

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS
DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN KARO**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-2) Master of Arts
Dalam Bidang Hukum Islam
Pada Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara**



KPS II

Oleh :

TGL. TERIMA :	28-10-04
NO. INDUK :	0010/T/10/04
ASAL :	SUMB. ALM
	2004

RASTA KURNIAWATI BR PINEM
NIM. 01 HUKI 368

**Program Studi
HUKUM ISLAM**



*2x4.4.
KUR
P
e.1*

**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2004**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasta Kurniawati Br. Pinem
Nim : 01 HUKI 368
Tempat/tgl Lahir : Beganding, 07 Januari 1975
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jl. Demak No. 03 Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **"PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DI KABUPATEN KARO"** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Mei 2004

Yang membuat pernyataan



Rasta Kurniawati Br. Pinem

PERSETUJUAN

Tesis berjudul :

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS
DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN KARO**

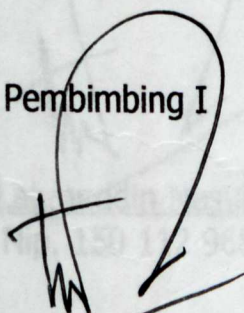
Oleh :

Rasta Kurniawati Br. Pinem
01 HUKI 368

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Master of Arts
pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara - Medan

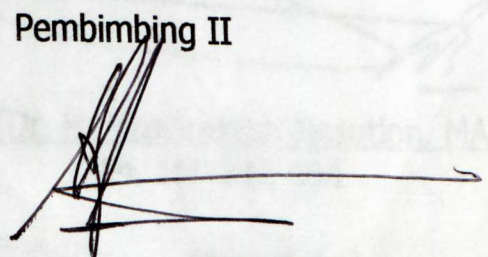
Medan, 5 April 2004

Pembimbing I



DR.H. Lahmuiddin Nasution, MA

Pembimbing II



Prof. DR. Ir. H. Meneth Ginting, MADE.

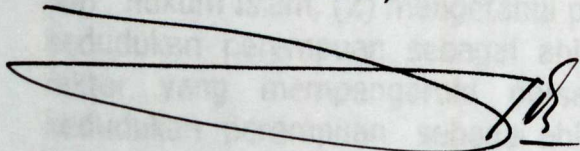
Tesis berjudul **"PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO"** an. Rasta Kurniawati Br Pinem, NIM 01 HUKI368 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 12 Mei 2004.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 24 Mei 2004

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua,



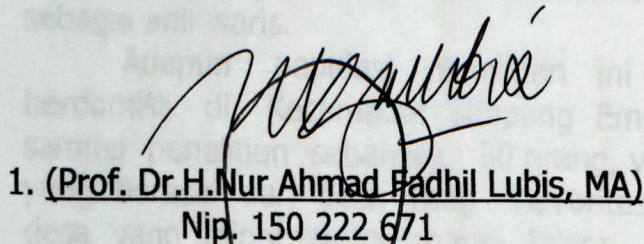
(Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA)
Nip. 150 216 584

Sekretaris,

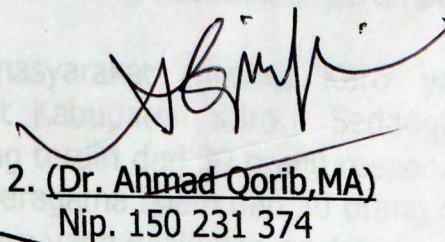


(Dr. Nawir Yuslem, MA)
Nip. 150 221 802

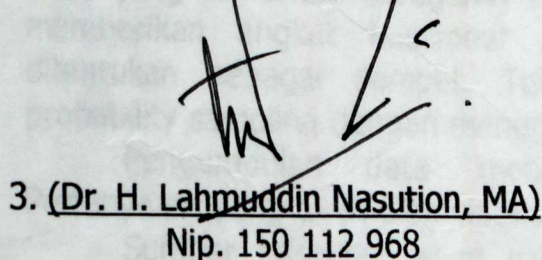
Anggota



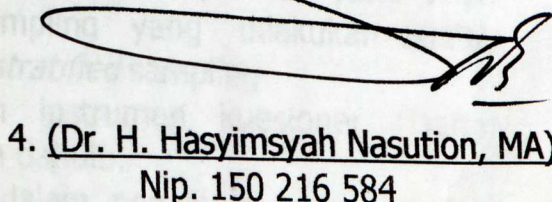
1. (Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA)
Nip. 150 222 671



2. (Dr. Ahmad Qorib, MA)
Nip. 150 231 374



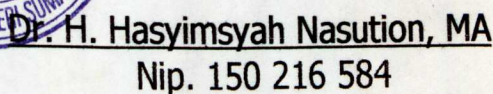
3. (Dr. H. Lahmuiddin Nasution, MA)
Nip. 150 112 968



4. (Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA)
Nip. 150 216 584

Mengetahui

Direktur PPS IAIN – SU



Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA
Nip. 150 216 584

RINGKASAN

Judul Tesis : Persepsi Masyarakat Muslim Karo Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo

Penulis : Rasta Kurniawati Br. Pinem / 01 HUKI 368
Pembimbing : 1. DR. H. Lahmuddin Nasution, MA
2. Prof. DR. Ir. H. Meneth Ginting, MADE.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menjelaskan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut hukum Adat dan hukum Islam, (2) mengetahui persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, (4) Kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, (5) hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, dan (6) pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

Adapun populasi penelitian ini masyarakat muslim Karo yang berdomisili di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. Sedangkan sampel penelitian sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 30 orang responden yang berasal dari desa yang mayoritas beragama Islam dan 30 orang dari desa yang minoritas beragama Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan angket kuesioner langsung kepada responden yang telah ditentukan sebagai sampel. Teknik sampling yang dilakukan adalah probability sampling dengan menggunakan *stratified* sampling.

Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner (Daftar Pertanyaan) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan adalah berupa hasil kuesioner para responden, yaitu masyarakat muslim Karo yang terpilih. Sedangkan data sekunder yang diperlukan bagi penelitian ini adalah dari berbagai sumber kepustakaan dan referensi-referensi lain, seperti majalah, artikel, jurnal, seminar, data hasil diskusi tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo dan lain-lain yang dapat menunjang sepenuhnya penelitian ini.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk hipotesis nomor satu sampai empat dianalisis secara *deskriptif*. (2) Untuk hipotesis nomor lima dianalisis melalui korelasi sederhana (*simple correlation analysis*). (3) Untuk hipotesis nomor enam dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linier berganda.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang diolah adalah benar untuk hipotesis pertama sampai enam.

Hipotesis pertama, menyatakan tidak ada perbedaan kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan hukum Islam. Hipotesis kedua, masyarakat muslim Karo memberikan kedudukan kepada perempuan sebagai ahli waris. Hipotesis ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris : jenis kelamin, status sipil, umur, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan lama memeluk agama Islam. Hipotesis keempat, masyarakat muslim Karo belum sepenuhnya menyadari tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo menurut hukum Islam. Adapun hipotesis kelima, hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat muslim Karo diperoleh : (1) jenis kelamin sebesar $r = -0,291$ (menunjukkan hubungan yang terbalik atau tidak mempunyai hubungan). (2) status sipil sebesar $r = 0,007$ (mempunyai hubungan sangat rendah) (3) umur sebesar $r = 0,127$ (mempunyai hubungan yang positif atau berpengaruh). (4) pekerjaan sebesar $r = -0,096$ (mempunyai hubungan yang rendah) (5) jumlah anggota keluarga sebesar $r = -0,299$ (mempunyai hubungan yang negatif) (6) tingkat pendidikan sebesar $r = -0,047$ (tidak mempunyai pengaruh). (7) lama memeluk agama Islam sebesar $r = 0,172$ (mempunyai hubungan yang positif). Dan hipotesis keenam, pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo dapat diperoleh hanya dari segi umur dan lama memeluk agama Islam. Sedangkan dari jenis kelamin, status sipil, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh.

Persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris adalah memberikan warisan kepada perempuan, berdasarkan kerelaan semata bukan berdasarkan ketentuan hukum Adat maupun hukum Islam. Ini berarti bahwa Islam dalam masyarakat Karo belum berpengaruh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *al-Hamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan *Taufiq* dan *Hidayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Selanjutnya *shalawat* dan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengangkat derajat perempuan dari yang sehinahinanya menjadi semulia-mulianya.

Tesis ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Muslim Karo Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Kabupaten Karo”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini juga penulis banyak menemui hambatan dan rintangan namun dengan usaha maksimal yang penulis lakukan serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat selesai. Atas bantuan yang diberikan, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **DR. H. Lahmuiddin Nasution, MA.** dan Bapak **Prof, DR. Ir. H. Meneth Ginting, MADE.** selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberi nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Bapak **DR. H. Hasyimsyah Nasution, MA.**, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang telah memberikan pelayanan akademisi yang baik kepada penulis.
3. Seluruh Dosen yang telah memberi Ilmu Pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, Pegawai perpustakaan, serta Pegawai Tata Usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
4. Seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan kampus maupun rekan-rekan yang di Pondok Pesantren Puteri Aisyiyah Sumatera Utara dan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan sumbangan moril kepada penulis.
5. Kepada kedua Orang Tua, **Jure Pinem** (Bapak) dan **Damenta Br. Sitepu** (Mamak) yang banyak jasanya dalam mengasuh, membesarkan, mendidik dan memotivasi penulis dalam menjalani proses pendewasaan diri.
6. Khusus kepada **Mitra Kencana Pinem, SH.** dan **Dra. Khuzaimah** (Abang dan Kakak), **Masmedia Pinem, M.Ag.** dan **Kartika Br. Sitepu, A.Md.** (Abang dan Kakak) serta **Muslim Pinem** dan **Lenta Lenny Br. Ginting** (Adik) yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian kuliah ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
7. Kepada seluruh responden penelitian ini (masyarakat muslim Karo desa Gung Pinto dan Beganding) juga tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih

karena tanpa informasi yang diberikan maka mustahil data tesis ini akan dapat selesai diperoleh.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan dan partisipasi dari semua pihak dalam penulisan tesis ini dapat dibalas dengan kebaikan yang setimpal. Dan *Jazakum Allāhu Khairan Katsiran. Āmīn Yā Robbal Ālāmīn.*

Medan, April 2004
Penulis

Rasta Kurniawati Br. Pinem

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	3
G. Peta Penelitian	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Masalah	12
B. Definisi Masalah	45
C. Jenis-jenis Masalah	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	54
----------------------	----

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
B. Kerangka Berpikir	45
C. Pengajuan Hipotesis	52
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	54

B. Populasi dan Sampel Penelitian	54
C. Defenisi Operasional	55
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	56
E. Sumber Data	57
F. Teknik Analisa Data	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	60
B. Identitas Responden	62
C. Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Masyarakat Karo menurut Hukum Adat dan Hukum Islam	67
D. Persepsi masyarakat Muslim Karo tentang Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris	69
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Responden	72
F. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Karo tentang Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris	81
G. Hubungan Karakteristik Responden terhadap Persepsi Masyarakat Muslim Karo	88
H. Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Persepsi masyarakat Muslim Karo	91

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	100

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman :
1.	Skema Kerangka Konseptual Kewarisan Masyarakat	50
2.	Skema Kerangka Berpikir Penelitian	52
3.	Hubungan Antara Variabel-Variabel Penelitian.....	53
4.	Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat	68
5.	Kedudukan Perempuan sebagai ahli waris menurut Hukum Islam.....	69
6.	Sikap Responden jika Harta Warisan diberikan kepada anak perempuan ..	70
7.	Sikap Responden jika Harta Warisan diberikan kepada Janda	71
8.	Faktor Jenis Kelamin Mempengaruhi persepsi Responden Terhadap Ahli Waris	73
9.	Faktor Status Sipil Mempengaruhi Persepsi Responden Terhadap Ahli Waris	74
10.	Faktor Umur Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris	75
11.	Faktor Pekerjaan Mempengaruhi Persepsi Responden Terhadap Ahli Waris	76
12.	Faktor Jumlah Anggota Keluarga Mempengaruhi Persepsi Responden Terhadap Ahli Waris	77
13.	Faktor Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Persepsi Responden Terhadap Ahli Waris	79
14.	Faktor Lama Memeluk Agama Islam Mempengaruhi Persepsi Responden Terhadap Ahli Waris	80
15.	Dasar Hukum Pemberian Warisan Kepada Anak Perempuan.....	82
16.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Laki-laki dan Perempuan Mendapat Bagian Yang sama	83
17.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat Bagian warisan	84
18.	Landasan Responden dan Keluarga dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan	86
19.	Keluarga Mematuhi Pelaksanaan Pembagian Warisan	87
20.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
21.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
22.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
23.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
24.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
25.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
26.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87
27.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana Janda Mendapat bagian warisan	87

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman :
1.	Sistematika Aspek jenis prilaku dalam Klasifikasi Tujuan Pendidikan	47
2.	Jumlah Sampel.....	55
3.	Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	56
4.	Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Daerah Penelitian Tahun 2004	62
5.	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
6.	Identitas Responden Berdasarkan Status Sipil	63
7.	Identitas Responden Berdasarkan Umur	64
8.	Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	64
9.	Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	65
10.	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	66
11.	Identitas Responden Berdasarkan Lama Memeluk Agama Islam	67
12.	Kedudukan Perempuan sebagai ahli Waris Menurut Hukum Adat.....	67
13.	Kedudukan Perempuan sbagai ahli Waris Menurut Hukum Islam	68
14.	Sikap Responden Jika harta Warisan Diberikan Kepada Anak Perempuan	70
15.	Sikap Responden Jika harta warisan diberikan kepada Janda	71
16.	Jenis Kelamin	72
17.	Status Sipil	73
18.	Umur	74
19.	Pekerjaan	76
20.	Jumlah Anggota Keluarga	77
21.	Tingkat Pendidikan	78
22.	Lama Memeluk Agama Islam	80
23.	Dasar Hukum Pemberian Warisan Kepada Anak Perempuan	81
24.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana laki-laki dan Perempuan mendapat bagian yang sama	82
25.	Melaksanakan Pembagian warisan dimana janda mendapat bagian warisan	84
26.	Landasan Responden dan Keluarga dalam pelaksanaan Pembagian warisan	85
27.	Keluarga Mematuhi Pelaksanaan Pembagian warisan	87

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman :
1.	Data Responden.....	103
2.	Kedudukan Perempuan sebagai ahli waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam	105
3.	Persepsi Masyarakat Muslim Karo tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris di Kabupaten Karo	107
4.	Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Karo Tentang Kedudukan Perempuan sebagai ahli Waris di Kabupaten Karo	108
5.	Angket Persepsi Masyarakat Muslim Karo tentang Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris di Kabupaten Karo	110
6.	Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Agama Tiap Desa Tahun 2001 di Kecamatan Simpang Empat	113
7.	Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Kantor Kepala Desa (Km) di Kecamatan Simpang Empat	114
8.	Matriks	115
9.	Corralations.....	117
10.	Regression	118
11.	Peta Kabupaten Karo	119
12.	Peta Kecamatan Simpang Empat	120
13.	Daftar Riwayat Hidup	121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah transliterasi berdasarkan Pedoman transliterasi Arab Latin SK Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ts	Es
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Sad	Sh	Es
15	ض	Dad	Dh	De
16	ط	Ta	Th	Te
17	ظ	Za	Zh	Zet
18	ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik
19	غ	Gain	Gh	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Kiu
22	ك	Kaf	K	Ke
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em

25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Opostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab, seperti halnya bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harkat, transliterasinya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Harkat	Nama	Huruf Latin	Contoh	Penulisan
1		(fathah)	a	قَرَأَ	Qara'a
2		(kasrah)	i	رَحِمَ	Rahim
3		(dammah)	u	كُتِبَ	Kutiba

Contoh : جَاهَدَ ditulis *jahada*

(سُئِلَ) ditulis *su'ila*

(رُوِيَ) ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap yang dalam bahasa Arab berupa gabungan harkat dan huruf transliterasinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

No	Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Contoh	Penulisan
1	اِيْ	(fathah dan ya)	Ai	كَيْفَ	Kaifa
2	اَوْ	(fathah dan waw)	Au	قَوْلَ	Qaul

C. Mâddah

Maddah atau Vokal panjang yang dalam bahasa Arab berupa gabungan huruf dan harkat, transliterasinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

No	Huruf dan Harkat	Nama	Huruf Latin	Contoh	Penulisan
1	اَ	(fathah)	ā	قَامَ	Qāma
2	إِ	(kasrah)	î	رَحِمَ	Rahîm
3	أُ	(dammah)	û	عُلُومَ	‘Ulûm

D. Ta Marbûtah (ة)

Transliterasi untuk *ta m^âbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/, misalnya : الشريعة المطهرة = ditulis *asy-syarī ‘at al-mutahharah*.

b. Ta Marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/, misalnya أهل السنة , زيدق ditulis *ahl as-Sunnah, Zaidiyah*.

E. Kata Sandang

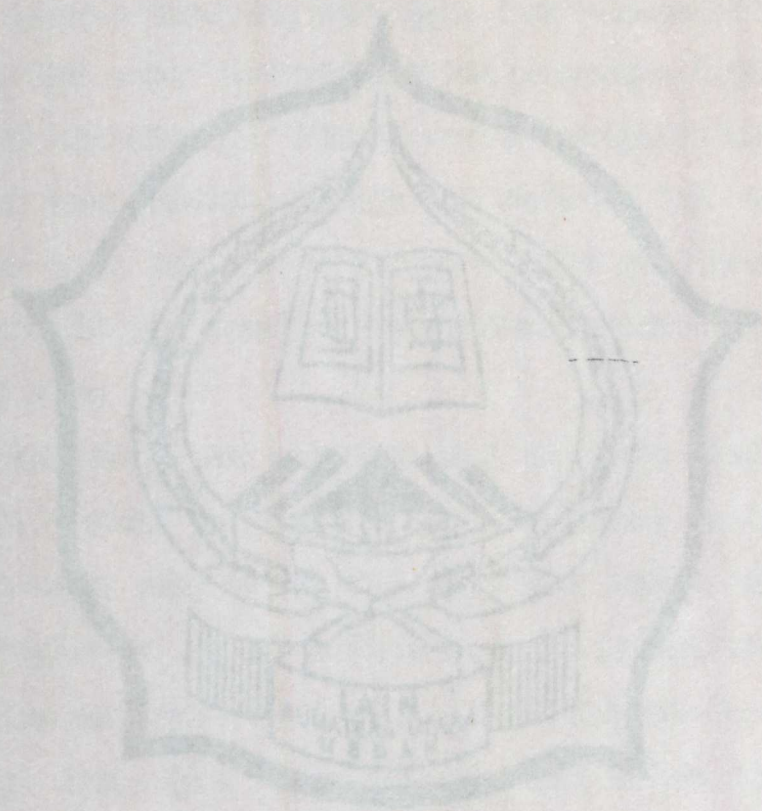
Kata sandang yang dalam bahasa Arab ditulis dengan ال ditulis menurut bunyi lafalnya. Jika ال termasuk *qamariyah* “al” seperti القلم menjadi *al-qalam*. Sedangkan ال *Syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyi huruf sesudahnya seperti الرحيم ditulis menjadi *ar-rahīm* dan الشمس ditulis menjadi *asy-syams*.

Baik didikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Singkatan

as.	= ‘ <i>alaih as-salām</i>
hal.	= halaman
H.	= tahun Hijriyah
M.	= tahun Masehi
Q.S.	= Al-Quran surat
ra.	= <i>radiallah ‘anhu</i>

saw. = *salla Allāh 'alaih wa sallām*
swt. = *subhānahu wa ta'ālā*
S. = Surah
t.p. = tanpa penerbit
t.t. = tanpa tahun



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan menurut *Jumhur Fuqahā* ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah seseorang meninggal, baik merupakan harta, atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.¹ Jelasnya warisan merupakan harta peninggalan dari mayit yang diberikan kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dijelaskan dalam *al-Qur'ān*. Tujuan pensyariaan untuk menghilangkan kesulitan, mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi setiap orang.

Namun dilihat dari kenyataan saat ini dalam masyarakat, warisan merupakan sumber perselisihan dan percekocokan, terutama dalam hal penentuan siapa yang berhak dan yang tidak berhak, serta jika berhak berapa bagiannya. Hal ini merupakan sebab perselisihan yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan keretakan dalam keluarga khususnya.

Dalam masyarakat Karo misalnya, oleh Meliala dan Peranginangin dituturkan, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan keluar dari golongan *patrilineanya* semula sesudah kawin.² Memperluas adat ini, pewaris ketika hidup memberi sebidang tanah kepada anak perempuan, dan ia dapat mengusahakan tanah itu sebagai hak pakai seumur hidup, setelah pewaris meninggal dunia. Begitu pula janda bukanlah

¹Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9-10.

²Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembantuan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito, 1979), h. 54.

ahli waris, namun selama ia melaksanakan dermanya sebagai seorang janda kepadanya diberi hak menikmati hasil dari harta peninggalan pewaris.³

Demikian halnya dalam masyarakat Karo pada umumnya maupun masyarakat muslim Karo khususnya dalam kenyataan masih banyak yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan dan janda dalam pembagian harta waris. Anak perempuan dan janda tidak diberi harta warisan sama sekali, dalam arti tidak berhak menguasai harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Sehingga dalam prakteknya walaupun harta warisan diberikan kepada anak perempuan, hanya sebagai hak pakai saja. Jadi harta itu diberikan hanya bersifat sementara yaitu sepanjang hidupnya saja. Pemberian ini tidak dibuat dalam sebuah surat perjanjian. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara pasti baik itu dalam penagihannya kembali oleh ahli waris laki-laki.

Akibatnya jika harta tidak diminta kembali oleh ahli waris laki-laki maka harta tersebut akan terus-menerus dipakai oleh ahli waris perempuan dan keturunannya, sehingga bisa saja di belakang hari yang meminta adalah anak atau keturunan ahli waris laki-laki. Hal ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman serta perasaan yang tidak menyenangkan bahkan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga karena ahli waris perempuan serta anak keturunannya telah memakai harta tersebut bertahun-tahun.

Selanjutnya kedudukan perempuan (anak perempuan dan janda) dalam hukum kewarisan adat Karo pada masa kini yang terdapat dalam *Yurisprudensi*, terjadi perkembangan dari ketentuan adat lama kearah yang memberi kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan.

³*Ibid.*, h. 56.

Berikut dikemukakan beberapa perkembangan *Yurisprudensi* yang menyangkut kedudukan janda dalam hukum kewarisan adat Batak :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 1957, No. 50 K/Sip/1954 yang menetapkan, menurut hukum adat di daerah Batak, seorang janda tidak dapat mewarisi tanah-tanah peninggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah peninggalan suaminya itu selama diperlukan buat penghidupannya.
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Oktober 1958, No. 54 K/Sip/1958 memutuskan, menurut hukum adat Batak, janda tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1959, No. 320 K/Sip/1958 yang mengemukakan, menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman pada waktu sekarang
 - a. Si isteri dapat mewarisi harta pencaharian dari sang suami yang meninggal dunia ;
 - b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
 - c. Karena anak berada di bawah pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.
4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 1968, No. 100 K/Sip/1967, mengenai adat di daerah Kabanjahe menetapkan, pertumbuhan masyarakat pada dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dan

menetapkan janda sebagai ahli waris telah merupakan *Yurisprudensi* yang dianut oleh Mahkamah Agung.⁴

Beberapa putusan Mahkamah Agung itu memperlihatkan adanya perkembangan dalam menentukan status janda sebagai ahli waris. Dalam dua putusan terdahulu, janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, namun mempunyai "hak memakai" seumur hidup. Sebaliknya dua putusan terakhir merupakan menetapkan janda beserta anak-anak berhak mewarisi harta pencaharian suaminya. Berarti, janda telah diakui menjadi ahli waris, sehingga ia berhak atas harta peninggalan suaminya bersama anak-anaknya dengan tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Oleh Mahkamah Agung anak perempuan dari masyarakat Batak juga telah ditetapkan dan diperkokoh kedudukannya menjadi ahli waris dengan menyimpang dari hukum kewarisan adat lama. Misalnya putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 No. 179 K/Sip/1961 mengenai warisan Batak Karo. Dalam pertimbangan tersebut, berdasar selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, diambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian mereka adalah sama.

Putusan Mahkamah Agung ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuka suku Karo. Sebagian sangat setuju dengan isi putusan tersebut, bahkan dikatakan sangat terpuji sekali, karena Mahkamah Agung telah memajukan ketertiban hukum di daerah Karo. Sebagian lainnya tidak menyetujui dan ditegaskan agar tradisi Adat yang selama ini menentukan

⁴Kuneng Mulyadi, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: PT. Setio Acnees, 1996), h. 405.

anak perempuan tidak usah mendapat bagian dan harta warisan orang tuanya harus tetap dipertahankan.⁵

Rehngena Purba seperti dikutip dari Soekanto dan Taneko (1981) mengatakan, dalam kenyataannya di Tanah Karo hukum kewarisan Adat lama masih dipertahankan, yaitu masih dipakainya ketentuan hanya anak laki-laki saja yang memperoleh warisan dari orang tuanya. Tetapi dari sudut lain, masyarakat Karo sendiri sudah cenderung untuk menggunakan ketentuan putusan Mahkamah Agung tersebut dalam mempertahankan haknya maupun dalam pembagian warisan, yaitu terlihat pada banyaknya perkara ke pengadilan mengenai masalah warisan ini.⁶

Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, Mahkamah Agung dengan *Yurisprudensi* kelihatan telah berketeguhan hati untuk memberikan setatus anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak umumnya dan Karo khususnya. Keteguhan ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1976 No. 707 K/Sip/1973 yang menetapkan pembagian warisan dalam perkara ini (di daerah Karo) sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak perempuan sama dengan laki-laki dalam hukum warisan.⁷

Dengan melihat perkembangan hukum di atas, setiap individu masyarakat muslim Karo akan memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang dan memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat Karo itu sendiri. Dimana persepsi yang positif akan mempengaruhi pelaksanaan praktek kewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan sesuai lingkungan sosio-kultural masyarakat bersangkutan.

⁵Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, *op. cit.*, h. 76.

⁶Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), h. 290.

Menurut *Morgan, King* dan *Robinson*, persepsi menunjuk pada bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, mengecap dunia di sekitar kita, dengan kata lain persepsi dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang dialami oleh manusia.⁸

William James juga mengatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (*memory*) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki). Pengolahan ingatan ini mengacu pada suatu *elaborasi, transformasi* dan kombinasi berbagai *input*.⁹

Atas dasar inilah, maka sangat perlu diteliti dan selanjutnya menuangkannya dalam bentuk penulisan tesis. Dengan meneliti persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang ada di Kabupaten Karo, yang diberi judul : PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DI KABUPATEN KARO.

C. Pembatasan Masalah

B. Identifikasi Masalah

Islam mengatur tentang kewarisan secara rinci, baik itu tentang harta warisan, siapa yang berhak mendapat warisan, berapa porsi pendapatannya dan bagaimana cara membaginya. Begitu juga dengan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam warisan telah diatur secara terperinci, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan walaupun porsinya berbeda.

⁷Kuneng Mulyadi, *op. cit.*, h. 236-245.

⁸Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Perkembangan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), h. 105.

⁹*Ibid.*

Namun kenyataannya banyak sekali permasalahan yang ditemukan seputar kedudukan perempuan sebagai ahli waris khususnya dalam masyarakat Karo. Untuk itu masyarakat muslim Karo yang telah mengetahui dan memahami ajaran Islam secara baik serta sadar dalam pelaksanaannya akan berbeda persepsinya dengan masyarakat muslim Karo yang belum begitu mendalam pemahamannya. Hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman agama yang mereka miliki tersebut.

D. Rumusan Persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris apakah dipengaruhi oleh agama, pendidikan dan hukum Adat Karo itu sendiri, maupun pengaruh hukum Islam sehingga diketahui praktek masyarakat selama ini.

Selanjutnya juga perlu diketahui mengenai persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, melihat keterkaitannya dengan pengetahuan ajaran Islam yang dimiliki oleh masyarakat muslim Karo itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Banyak sekali permasalahan yang dijumpai sekitar kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo namun permasalahan tersebut perlu dibatasi agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada sasaran yang akan dibahas. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas mengenai persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo. Sebelum dibahas tentang persepsi terlebih dahulu dipaparkan tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat menurut hukum Adat, kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam, persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris, faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

Selanjutnya juga perlu diketahui mengenai persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, melihat keterkaitannya dengan pengetahuan ajaran Islam yang dimiliki oleh masyarakat muslim Karo itu sendiri.

D. Rumusan Masalah

Melihat pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan hukum Islam ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo ?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo ?
4. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat kabupaten Karo ?
5. Apakah ada hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo ?
6. Apakah ada pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut hukum Adat dan hukum Islam.
2. Mengetahui persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
3. Mengetahui faktor-faktor yang memppengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
4. Mengetahui kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
5. Mengetahui hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
6. Mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kepada pemuka Adat, Agama dan Pemerintah sebagai *decition maker*, hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai konstribusi pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

2. Kepada masyarakat Karo agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya supaya perempuan diberikan hak waris sesuai dengan ajaran Islam dengan tanpa paksaan.
3. Kepada peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan objek penelitian yang dimaksud.

G. Kajian Terdahulu

Hingga saat ini, tidak ditemukan satu karya tulis pun yang secara spesifik mengkaji tentang persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo, disertai dengan mengkaji faktor-faktor dan akibatnya dalam keluarga dan masyarakat, juga melihat perkembangan hukum dalam masyarakat.

Meskipun ditemukan beberapa karya tulis yang secara tidak langsung berbicara tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo, akan tetapi karya-karya seperti ini hanya bersifat pemaparan tentang praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat Karo, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo disertai dengan penjelasan tentang faktor-faktor tidak diberikan kedudukan sebagai ahli waris dan akibat yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Bahkan juga tidak mengkaji tentang perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat dan relevansinya dengan hukum Islam. Di antara karya tersebut adalah tulisan Djaja S. Milala, SH dan Aswin Peranginangin, SH. Berjudul *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, diterbitkan Tarsito Bandung tahun 1979. Materi ini adalah

memaparkan secara umum tentang Hukum keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Tanah dan Hukum Waris. Namun sayangnya belum ada secara jelas dipaparkan tentang persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo serta perkembangan hukum waris khususnya, lebih-lebih jika dikaji dari tinjauan hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Untuk melihat kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam, terlebih dahulu akan dilihat bagaimana kedudukan perempuan dalam warisan sebelum datangnya Islam yaitu perempuan sama sekali tidak mempunyai hak dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum perempuan tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya, bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh" ? Mereka mengharamkan kaum perempuan menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkan kepada anak-anak kecil, sehingga turunlah surat an-Nisa' ayat : 11.¹

Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah ketika Islam datang ada ketetapan syari'at yang memberi kepada perempuan hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat ayah atau suami dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberikan hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan

424. ¹as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, (Bairut, : Dar al-Fikr, 1403 H/1983), Jilid III, h.

yang telah Allah pastikan dalam syari'at-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw, berupa ayat-ayat tentang waris, kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus. Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Kemudian dengan datangnya ajaran syari'at Islam yang bertujuan untuk menyantuni kaum perempuan. Islam telah mampu melepaskan kaum perempuan dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashabul furūd* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisnya).

Namun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yang tidak benar yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang berhati buruk, beranggapan bahwa Islam telah menzalimi kaum perempuan dalam hal hak waris, karena hanya memberikan setengah dari hak kaum laki-laki.²

a. Dalil al-Qur'an Tentang Warisan

Adapun ayat-ayat mengenai warisan yang di dalamnya diatur secara rinci tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris adalah :

²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h.. 22-23.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
من بعد وصية يوصي بها أو دين وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من
الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركن إن لم
يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية
من الله والله عليم حكيم³

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu Bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) menfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

³Q.S. An-Nisa' / 4 : 11-12.

Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) saja atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha penyantun.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ مَوْتُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا

تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁴

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tantang kalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan

⁴Q.S. an-Nisa'/4 : 176

perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha Mengetahui segala sesuatu".

Untuk jelas maksud turunnya ayat ini maka dapat dilihat *asbābun nuzūh*nya, yaitu diantaranya diriwayatkan oleh Iman Bukhari dan Imam Muslim.

Suatu ketika isteri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah Saw. dengan membawa kedua orang puterinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua puteri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi yang telah meninggal sebagai syuhada katika perang Uhud. Tetapi Paman kedua puteri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya. "Kemudian Rasulullah Saw. bersabda : "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini". Maka turunlah ayat tentang waris yaitu surat an-Nisa' ayat 11.

Rasulullah Saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua puteri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua pertiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua puteri itu. Sedangkan ibu mereka (isteri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.⁵

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang isteri dan lima saudara perempuan. Namun seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan

⁵as-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 424

direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummi Kahah (isteri Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi Saw. maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan ini.

b. Orang-orang Yang Mendapat Warisan

Apabila ditelaah pendapat *Jumhûr Ulamâ* dalam kitab-kitab Fiqh kewarisan, maka dapat diketahui bahwa keseluruhan orang-orang yang berhak mendapat warisan ada 25 orang. Keseluruhan ahli waris tersebut terbagi atas golongan ahli waris laki-laki sebanyak 15 orang dan golongan ahli waris perempuan sebanyak 10 orang.

Golongan ahli waris laki-laki, terdiri dari :

- 1). Anak laki-laki.
- 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 3). Ayah.
- 4). Kakek yang sah dan seterusnya ke atas.
- 5). Saudara laki-laki kandung.
- 6). Saudara laki-laki seayah.
- 7). Saudara laki-laki seibu.
- 8). Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 9). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 10). Paman kandung.
- 11). Paman seayah.
- 12). Anak laki-laki dari paman kandung.
- 13). Anak laki-laki dari paman seayah.
- 14). Suami.

15). Laki-laki yang memerdekakan budak.

Bila seseorang meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya terdiri dari keseluruhan ahli waris laki-laki di atas, maka yang berhak mewarisi hanya tiga orang saja yaitu ayah, anak laki-laki dan suami.

Adapun golongan ahli waris perempuan terdiri dari :

- 1). Anak perempuan.
- 2), Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 3). Ibu.
- 4). Nenek yang sah dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- 5). Nenek yang sah dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.
- 6). Saudara perempuan kandung.
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8). Saudara perempuan seibu.
- 9). Isteri.
- 10). Perempuan yang memerdekakan budak.

Bila ketika seseorang meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya terdiri dari keseluruhan ahli waris perempuan di atas, maka yang berhak mewarisi hanya empat orang saja yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan isteri.

Dan bila ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya masih ada, maka yang berhak mewarisi hanya 5 orang saja yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami atau isteri.⁶

⁶Muchammad Ali ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Alih Bahasa Zaid Husein al-Hamid, (Surabaya : Mutiara ilmu, t.t.), h. 38



No. 0010/7/10/24

19

2x4.4

KUR

P 0.1

Adapun bahagian uang diperoleh ahli waris ada dua macam, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan (*furûdhul muqaddarah*) dan yang tidak ditentukan secara pasti (*ashabah*).

a). Ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan (*furûdhul muqaddarah*).

Furûdhul Muqaddarah ada enam yaitu : setengah, sepertiga, seperempat, ^espersenam, seperdelapan dan dua pertiga. Ketentuan ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 di atas.

Adapun jumlah perincian yang diterima masing-masing ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut :

(1). Anak perempuan, berhak menerima bagian :

- (a). Setengah, bila hanya seorang dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- (b). Dua pertiga, bila dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki.

(2). Ibu, berhak mendapat bagian :

- (a). sepertiga, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih.
- (b). Seperenam, bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih
- (c). Sepertiga, dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

(3). Ayah, berhak mendapat bagian :

- (8) (a). Seperenam, (sebagai hak minimal) ditambah *ashabah* bila si pewaris meninggalkan anak perempuan.
- (b). *Ashabah*, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- (4). Duda (suami), berhak mendapat bagian :
 - (a). Setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - (b). Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak.
- (5). Janda (isteri), berhak mendapat bagian :
 - (a). Seperempat, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - (b). Seperdelapan, bila pewaris meninggalkan anak.
- (6). Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, berhak mendapat bagian :
 - (a). Masing-masing seperenam, bila pewaris tidak meninggalkan anak/cucu dan ayah/kakek.
 - (b). Sepertiga, secara bersama-sama bila mereka dua orang atau lebih.
- (7) Saudara perempuan kandung berhak mendapat bagian :
 - (a). Setengah, bila ia sendiri dan si pewaris tidak meninggalkan anak/cucu dan ayah/kakek, (dalam pengertian si pewaris *kalah*).
 - (b). Dua pertiga, bila dua orang atau lebih, dengan syarat dia tidak menjadi *ashabah* dengan orang lain atau bersama orang lain.
 - (c). *Asahabah bighairihi*, bila bersama dengan saudara laki-laki sekandung, (yaitu bagian saudara laki-laki sekandung dua banding satu dengan saudara perempuan kandung).

- (8). Saudara perempuan seayah (bila saudara perempuan kandung tidak ada), berhak mendapat bagian :
- (a). Setengah, apabila pewaris tidak meninggalkan anak/cucu dan ayah/kakek, (dalam pengertian si pewaris *kalalah*).
 - (b). Dua pertiga, dengan syarat apabila saudara perempuan kandung tidak ada.
 - (c) *Ashabah bighairihi*, bila bersama dengan saudara laki-laki seayah, (yaitu bagian saudara laki-laki seayah dua banding satu dengan saudara perempuan seayah).
- (9). Cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat bagian :
- (a). Setengah (bila ia sendiri), dengan syarat si pewaris tidak meninggalkan anak perempuan tunggal.
 - (b). Seperenam, bila si pewaris meninggalkan satu orang anak perempuan.
 - (c). *Ashabah bighairihi*, bila ia bersama dengan cucu laki-laki, (maka bagian cucu laki-laki adalah dua banding satu dengan cucu perempuan.)
- (10). Kakek, (kalau ayah tidak ada) mendapat bagian :
- (a). Seperenam, (sebagai hak minimal) ditambah *ashabah* bila si pewaris meninggalkan anak perempuan.
 - (b). *Ashabah*, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- (11). Nenek dari pihak Ibu, (bila ibu tidak ada) maka ia sebagai pengganti Ibu, berhak mendapat bagian :

(a). Seperenam, bila pewaris meninggalkan anak atau keturunan, dan berbilang saudara laki-laki atau perempuan.

(12). Nenek dari pihak Ayah, (bila Ibu dan Ayah tidak ada) berhak mendapat bagian :

(a). Seperenam, bila si pewaris meninggalkan anak dan keturunan dan berbilang saudara laki-laki atau perempuan.

Apabila nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah keduanya ada maka mereka (*musyarakah*) bersekutu pada yang seperenam itu dengan membagi sama rata. Masing-masing mengambil setengah dari seperenam itu (*nisfu sudus*).

Kakek dan nenek dari ayah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 177 jo. Pasal 185, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayah (yang diganti). Begitu juga dengan kakek dan nenek dari ibu berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ibu (yang diganti). (pasal 178 jo. pasal 185 KHI)

b). Ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan (*ashabah*).

Ashabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furūd*. Sebagai penerima sisa semua harta, ahli waris *ashabah* terkadang pula menerima sedikit bahkan kadang-kadang

tidak menerima sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furūd*.⁷ Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Saw. :

⁸أَحَقُّوا الْفَرَاعِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama"

Kelompok ahli waris yang dikategorikan '*ashabah*' sebagai berikut :

(1). '*Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*ashabah*,⁹ yaitu :

- (a). Anak laki-laki.
- (b). Cucu laki-laki dari garis laki-laki.
- (c). Bapak.
- (d). Kakek (dari garis bapak).
- (e). Saudara laki-laki kandung.
- (f). Saudara laki-laki seayah.
- (g). Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
- (h). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- (i). Paman kandung.
- (j). Paman seayah.
- (k). Anak laki-laki paman sekandung.
- (l). Anak laki-laki paman seayah.
- (m). Laki-laki yang memerdekakan budak.

(2). '*Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena sama-sama dengan ahli waris lain menerima bagian

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. II, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 59.

⁸Abi 'Isa Muhammad bin "Isa bin Surah, *al-Jami 'u Shahih Sunan at-Turmuzy*, (t.t.p : t.p., t.t). Juz.IV, h. 418.

⁹Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 60.

sisanya.¹⁰ Jika ahli waris penerima sisa tidak ada maka ia tetap menerima bagian tertentu. Mereka adalah :

- (a). Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
- (b). Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
- (c). Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
- (d). Saudara perempuan ^{seayah/sebapak} sekandung bersama dengan saudara laki-laki ^{seayah/sebapak} sekandung.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung dalam menerima 'ashabah, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, Hal ini berdasarkan firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۚ¹¹

"Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan

- (3). 'Ashabah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian 'ashabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian 'ashabah. 'Ashabah ma'al ghair ini diterima ahli waris :
- (a). Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), karena bersama-sama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau bersama-sama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
 - (b). Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).
- Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw. :

¹⁰Ibid.

¹¹Q.S. an-Nisa'/4 : 11

قضى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين

وما بقي فلأخت. (رواه البخارى) ¹²

"Nabi Saw. memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, sebagai penyempurna dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan".

c. Hal Yang Menyebabkan dan Menghalangi Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab seseorang menerima warisan yang berlaku di dalam syari'at Islam dan tetap berlaku, ada tiga yaitu :

- 1). Hubungan perkawinan (*ashâb al-furûdh al-sababiyah*), yaitu adanya ikatan perkawinan baik pada hakikatnya, ataupun pada hukumnya di saat salah seorang dari suami isteri itu meninggal. Salah seorang dari suami isteri menerima warisan dari yang lain, walaupun belum terjadi percampuran. Dan warisan dengan jalan perkawinan ini, hanyalah dengan *jalan fardhu* (saham yang tetap saja). Hal ini berdasarkan firman Allah :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ¹³

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

¹²Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *op. cit.*, h. 415.

¹³Q.S. an-Nisa'/4 : 7

- 2). Kekerabatan (*an-nasab*), yaitu adanya hubungan kekerabatan bersifat adanya hubungan *nasabiyah* (genetik) antara pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (*furu'iyah*) yakni anak keturunan, ataupun ke atas (*ushuliyah*) seperti bapak/ibu dan juga bersifat menyamping (*hawasyiah*) yakni para saudara pewaris.¹⁴

Menerima warisan dengan jalan kerabat, dapat dengan jalan *fardhu* saja, dapat pula dengan jalan *ta'ashib* (menerima sisa dari yang diambil oleh *Ashabul Furûdh* karena dijadikan *ashabah*) saja atau dengan kedua-duanya atau dengan jalan *ta'shib* pada suatu keadaan dan dengan jalan *fardhu* pada keadaan yang lain.¹⁵

- 3). Perwalian (*'ashabah 'ushubah sababiyyah*), yaitu ahli waris yang diikat oleh *ushubah sababiyah* (*qarabah hukumiyah* atau kekerabatan pada hukum), sebagaimana dikatakan "*walaul itqi*" dan "*walaa un nikmati*", yaitu *ushubah* yang disebabkan oleh pemerdekaan. Yakni ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan, yang disebut *'atieq*.

Apabila orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, baik dengan sebab kekerabatan atau dengan sebab perkawinan, maka bekas tuannya (*mu'tiq* atau orang yang

¹⁴A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 27-28.

¹⁵Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 31.

memerdekakannya), berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan.¹⁶

Dengan adanya sebab-sebab seseorang dapat mendapatkan warisan di atas, belum menjamin secara pasti untuk mendapat hak warisan karena terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta warisan. Adapun hal-hal yang menghalangi tersebut, yang disepakati Ulama ada tiga yaitu pembunuhan, berlainan agama dan perbudakan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, penghalang mendapatkan warisan adalah pembunuhan, berlainan agama, berlainan negara serta ditambah dengan sebab memfitnah dan hilang tanpa berita. Sedangkan perbudakan tidak disebutkan karena dianggap pada saat ini perbudakan tidak ada lagi (dihapuskan).

- 1). Pembunuhan. Yang dimaksudkan dengan pembunuhan disini adalah pembunuhan dengan sengaja. Menurut Jumhur Ulama pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya.¹⁷

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw :

ليس القاتل من الميراث شيء (رواه النسائي)¹⁸

“Pembunuh tidak mendapat warisan dari yang dibunuhnya sedikitpun”

¹⁶Ibid., h. 31-31.

¹⁷as-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 427.

¹⁸Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia :Maktabah Dahlan, t.t.), Juz II, h. 884.

Lebih rinci lagi Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan secara sengaja atau tidak sengaja berakibat terhalangnya seseorang mewarisi harta warisan orang dibunuhnya, sekalipun yang melakukan itu seorang anak kecil ataupun gila. Sedangkan Maliki mengatakan bahwa yang dimaksud pembunuhan yang menghalangi mewarisi adalah pembunuhan sengaja karena adanya permusuhan, baik langsung ataupun tidak langsung.¹⁹ Yang dikatakan pembunuhan sengaja tidak langsung adalah pembunuhan yang mempergunakan media-media atau fasilitas tertentu untuk membunuh seseorang seperti mengajak berjalan di tempat-tempat yang berbahaya hingga membawa kematiannya, saksi palsu berakibat terbunuhnya orang.

Dalam hal pembuktian seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja inilah membutuhkan hakim yang adil untuk memutuskannya sehingga jelas menghalangi atau tidaknya seseorang mewarisi pewaris tentang hartanya sesuai dengan ketentuan porsinya.

Dengan perbedaan pendapat di atas dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku II Bab II, Pasal 173 menyebutkan : seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena : (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah

¹⁹as-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 427.

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Melihat kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masalah-masalah baru mungkin akan timbul dalam cara-cara yang ditempuh si pembunuh dengan memperlak orang lain dengan berbagai cara, sehingga tidak mudah menentukan pelaku pembunuhan. Bahkan sulit untuk mengungkap kebenaran materil dalam suatu kasus, benarkah seseorang itu telah membunuh dengan sengaja atau tidak, bahkan benarkah seseorang itu telah memfitnah sehingga berakibat kepada penghalang mewarisi.

- 2). Perbedaan agama. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخارى)²⁰

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.

Hal tersebut juga sebelumnya telah diungkapkan dalam surat an-Nisa’ ayat 141 :

....ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا²¹

“... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).”

²⁰Imam Abi Husain Muslim Bin Hujaj bin Muslim al-Qasyiri an-Naisabury, *al-Jami’u ash-Shahih Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, t.t.), Juz V, h. 59.

²¹Q.S. an-Nisa’/4 : 141.

Ketiga macam penghalang untuk mendapatkan warisan di atas telah disepakati oleh para ulama namun mereka berbeda dalam merincikannya.

Tentang berbeda agama Ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak mewarisi harta seorang muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi harta non muslim. Imamiyah berpendapat bahwa ia tetap berhak untuk mewarisi orang tuanya yang kafir (tanpa berhak untuk diwarisi oleh orang kafir). Sedangkan Mazhab empat mengatakan tidak boleh.²²

Jika pada kasus pertama menunjuk kemungkinan terjadi murtadnya seorang muslim dari agama Islam berarti terhadap ayah saudara dan anaknya yang beragama Islam ia tidak ada lagi hak untuk mewarisinya (sebagai fenomena yang mungkin terjadi dalam kehidupan). Sedangkan pada kasus kedua boleh jadi dalam keluarga seorang yang bukan Islam seperti seorang anak laki-lakinya masuk Islam maka bagi kelompok mazhab empat hubungan kewarisan tetap menjadi terputus dan sebaliknya bagi kelompok syi'ah berpendapat tetap dapat dari orang tuanya yang kafir.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, dan setelah melihat pendapat Ulama mazhab, maka dapat dikatakan pendapat Ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dapat dijadikan hujjah untuk menciptakan kepastian hukum dengan pertimbangan, pendapat mereka diperkuat oleh nash al-Qur'an dan hadis. Disamping untuk

kemaslahatan, masalah tersebut melahirkan suatu hukum juga tidak terjadinya kontradiksi dengan ruh al-Qur'an dan hadis.

- 3). Berlainan Negara. Negara merupakan suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bresenjata sendiri, kepala negara sendiri dan memiliki kedaulatan tersendiri serta tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara lain.

Adapun berlainan negara sebagai penghalang mendapat warisan adalah apabila diantara dua negara yang berbeda keriterianya, Namun jika dua negara sama-sama muslim maka mayoritas Ulama sependapat menetapkan tidak menjadi penghalang bagi mewarisi antara sesama muslim. Karena negara-negara Islam walaupun berbilang-bilang pemerintahnya dan letaknya jauh serta berbeda tata aturanya namun dipandang sebagai suatu negara dengan ijma' segenap Fuqaha' Islam.²³ Dan jika dikaitkan dengan negara Indonesia berlainan negara sebagai penghalang mendapat warisan karena dihubungkan dengan kepentingan nasional berdasarkan pasal 5 jo. pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan salah satu dapat dijadikan penghalang mendapat warisan saling mewarisi. Pasal ini membedakan disatu pihak warga negara Indonesia dan di lain pihak orang asing. Namun UUPA penuh dengan ketentuan-ketentuan dan tidak ada jalan

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Khamsah*, Ditejemahkan Masykur AB. Dkk., Cet. II, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996), h. 541.

²³ as- Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 327-328.

2. Kedudukan keluar apapun untuk melegalkan orang asing mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sama dengan warga negara Indonesia.²⁴

4). Hilang tanpa berita. Hilang tanpa berita ini, dimana ahli waris tidak diketahui ada atau tidaknya berdasarkan keputusan Hakim di Pengadilan. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat, bahwa orang yang hilang tanpa berita dipandang telah meninggal diwaktu Hakim menetapkan keadaannya, dan berakibat terhadap warisannya dari orang lain dan terhadap pusaka orang lain kepadanya.²⁵

Dua hal yang perlu ditetapkan terhadap orang yang hilang tanpa berita, yaitu pertama memandang bahwa orang tersebut masih hidup dan kedua memandang bahwa orang tersebut telah meninggal. Kemudian diperhatikan bagian-bagian ahli waris yang menerima warisan bersamanya. Jika bagian seseorang ahli waris berbeda karena perbedaan anggapan diberikan kepada ahli waris bagian yang terendah, dan disimpan perbedaan antara dua bagiannya hingga nyatalah keadaannya. Namun jika tidak berbeda, maka ahli waris-ahli waris itu mengambil bagian yang sempurna.

²⁴A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1993), h. 26.

²⁵Muhammad Hasbi ash-Shieddiqy, *op. cit.*, h. 280.

2. Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Karo

Sudah merupakan alamiah bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling esensial ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang esensial dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk upacara peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Sedangkan sistem perkawinan dalam suatu daerah di Indonesia dapat dilihat dari sifat *clan* dalam perkawinan tersebut.

Dalam masyarakat Karo (juga dalam masyarakat Batak umumnya), desa adalah merupakan persekutuan wilayah, sedang rakyat terhimpun dalam beberapa *clan patrilineal* yang disebut marga (merga). Pemimpin desa adalah seorang marga tanah yang memiliki atribut itu atas dasar pewarisan pancar laki-laki dibantu oleh beberapa anggotanya, baik dari marganya sendiri maupun dari marga kawinnya.

Disini berlaku *exogami*, dan kesatuan *exogami* adalah *lineage* yang *exipso* (dari dirinya sendiri) menimbulkan *exogami* juga antara *clan* dengan *clan*. Adanya *lineage* dan *clan* pancar laki-laki mengakibatkan keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum perempuannya, yang berkonsekwensi, diantaranya :

2. Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Karo

Sudah merupakan alamiah bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling esensial ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang esensial dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk upacara peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Sedangkan sistem perkawinan dalam suatu daerah di Indonesia dapat dilihat dari sifat *clan* dalam perkawinan tersebut.

Dalam masyarakat Karo (juga dalam masyarakat Batak umumnya), desa adalah merupakan persekutuan wilayah, sedang rakyat terhimpun dalam beberapa *clan patrilineal* yang disebut marga (merga). Pemimpin desa adalah seorang marga tanah yang memiliki atribut itu atas dasar pewarisan pancar laki-laki dibantu oleh beberapa anggotanya, baik dari marganya sendiri maupun dari marga kawinnya.

Disini berlaku *exogami*, dan kesatuan *exogami* adalah *lineage* yang *exipso* (dari dirinya sendiri) menimbulkan *exogami* juga antara *clan* dengan *clan*. Adanya *lineage* dan *clan* pancar laki-laki mengakibatkan keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum perempuannya, yang berkonsekwensi, diantaranya :

- a. Cara perkawinan biasa adalah perkawinan “jujur” (Karo : unjuken), artinya pihak laki-laki membayar maskawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan, Isteri berpindah ke dalam *clan* suami.
- b. Anak-anak menjadi anggota *clan* ayahnya.
- c. Suami berdominasi di dalam *brayat* (keluarga).
- d. Adanya perkawinan *levirate* (kawin mengganti, “medun ranjang”, janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya dan *surorat* (kawin meneruskan, “kawin ngarang wulu”, duda kawin dengan saudara perempuan mendiang isterinya).

Isteri pada hakikatnya tidak berhak atas harta perkawinan.

Dari gambaran tersebut, nampak masyarakat Karo menganut garis keturunan Bapak (patrilineal). Sehubungan itu maka dalam rumah tangga yang berkuasa atau dominan adalah laki-laki. Karena garis keturunan adalah laki-laki, maka seseorang yang berumah tangga jika belum mempunyai anak laki-laki (walau sudah ada anak perempuan) belum merasa sempurna, sebab belum ada yang melanjutkan keturunannya.

1). Orang-orang Yang Berhak Mendapat Warisan

Adapun urutan-urutan yang berhak mendapat warisan dalam masyarakat Karo adalah :

- a). Anak laki-laki.

Yang dimaksud dengan anak laki-laki adalah keturunan laki-laki yang sah. Ia berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang harus dibagi rata diantara mereka. Jadi apabila si pewaris meninggalkan tiga orang anak laki-laki, maka masing-masing mendapat sepertiga bagian dari seluruh harta termasuk harta pusaka. Namun jika pewaris tidak mempunyai

anak laki-laki sebagai ahli waris, tetapi mempunyai anak perempuan maka harta warisan tetap dapat dibagi kepada anak perempuan tersebut, dengan syarat ia ilakiken yaitu diangkat kedudukannya menjadi anak laki-laki. Sedangkan harta pusaka tetap dapat dipakai oleh anak perempuan seumur hidupnya, dan setelah itu tanah kembali kepada pengulihen yaitu kembali kepada asalnya.²⁶

b). Anak angkat.

Yang dimaksud dengan anak angkat dalam masyarakat Karo adalah anak bawaan pihak laki-laki atau perempuan dari perkawinannya yang pertama kepada perkawinannya yang kedua (istilah Indonesia : anak tiri). Anak tiri menjadi anak angkat setelah ada persetujuan pihak suami atau isteri di dalam perkawinannya yang kedua, kemudian disahkan oleh anak beru dan senina (keluarga terdekat) melalui upacara Adat dan dihadapan tokoh-tokoh Adat.

Anak dari luar (diluar marga) dapat juga diangkat menjadi anak angkat, tetapi dengan persetujuan anak beru dan senina. Setelah ia disahkan menjadi anak angkat maka terputuslah hubungan kekerabatannya dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut masuk ke dalam *clan* ayah angkatnya.²⁷ Terhadap harta bersama (harta pencaharian) orang tua, kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama, terkecuali terhadap harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

²⁶Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung : Tarsito, 1979), h. 54-55.

²⁷*Ibid.*, h. 38-39

Setelah anak angkat menjadi anak yang sah oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus, dan si anak masuk ke clan ayah angkatnya. Hak dan kewajiban anak angkat dan anak kandung menjadi sama kecuali terhadap harta pusaka, anak angkat tidak berhak. Harta pusaka *ngulihi karangna* artinya telah kembali ke asalnya.²⁸

c). Ayah dan Ibu, dan saudara-saudara sekandung dari si pewaris.

Apabila golongan nomor satu dan dua di atas tidak ada, maka yang mewarisi secara bersama-sama adalah ayah dan ibu, dan saudara-saudara sekandung dari si pewaris.²⁹

d). Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu. Golongan ini mendapat warisan bila ketiga golongan di atas tidak ada.

e). Persekutuan Adat.

Apabila keempat golongan di atas tidak ada maka harta warisan jatuh pada persekutuan Adat atau *kuta/kesain* (kira-kira sama dengan *Baitul Mal* dalam Islam). Orang yang satu *kuta/kesain* atau satu marga berhak menerima warisan, untuk keperluan umum (*kuta/merga*) atau masyarakat kampung tersebut.

Dari gambaran di atas maka telah diketahui bahwa garis keturunan pada masyarakat Karo diambil berdasarkan garis keturunan ayah. Oleh sebab itu anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keturunan sekaligus sebagai pewaris (yang menerima

²⁸*Ibid.*

warisan). Namun demikian kepada anak perempuan juga mendapat bagian yang disebut *pemere* (pemberian) berdasarkan kasih atau *kekelengen*. *Pemere* dari orangtua kepada anak perempuan baik berupa tanah atau benda semasih orang tua tidak dapat dilarang oleh anak laki-laki. Tetapi setelah orang tua kedua-duanya meninggal, anak laki-laki dapat meminta *pemere* berupa tanah buat-buatan yang telah dipakai oleh anak perempuan. Boleh juga dipakai oleh anak perempuan selama hidupnya jika atas persetujuan saudaranya.

2). Sebab-sebab Perempuan Tidak Mendapat Warisan

Dalam hal ini akan bisa timbul pertanyaan “mengapa anak laki-laki yang berhak dalam warisan?” Hal ini karena laki-laki yang selain sebagai penerus silsilah keturunan, semua tanggung jawab terhadap orang tua, ibu atau bapak, hutang dan lain-lain adalah menjadi tanggungan anak laki-laki yang tertua. Tanggung jawab itu lebih besar dimana kalau ayahnya telah meninggal, maka tumpuan tanggung jawab terhadap adik-adiknya terletak padanya.

Jika seseorang/kepala keluarga meninggal dunia, maka hartanya dikuasai oleh isterinya. Selama isteri tersebut masih hidup harta warisan tidak dapat dibagi-bagikan terkecuali atas seizinannya. Setelah ia meninggal dunia, maka harta pusaka tersebut beralih ke tangan anaknya yang laki-laki.³⁰

Dalam hal pembagian, menurut lazimnya anak tertua dan anak termuda bertindak sebagai formatur dengan disaksikan oleh pihak *anak beru* dan *seninanya*.

²⁹*Ibid.*, h. 55.

³⁰Bujur Sitepu, *Mengenal Kebudayaan Karo*, (Sigarang-garang Kabanjahe : t.p., 1978), h..

Harta warisan yang dibagi adalah harta warisan orang tuanya sendiri antara lain rumah, sawah, ladang dan ternak. Sedang barang-barang seperti cincin, pisau, tongkat, pakaian dibagikan kepada anak perempuan, sebahagian menjadi ^{sapu plus} *maneh-maneh* dan *morah-morah* (tanda mata atau kenang-kenangan) dan sisanya kepada anak laki-laki.

Jika isteri orang yang meninggal lebih tersebut lebih dari satu orang, maka pembagian warisan didasarkan kepada pembagian menurut jumlah isterinya. Kemudian masing-masing anak memperoleh bagian dari pusaka atau warisan dari ibunya.

3). Jenis-Jenis Harta dalam Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan disebut harta dalam perkawinan. Namun demikian tidak semua jenis harta dalam perkawinan dapat dibagi sebagai harta warisan.

Adapun jenis-jenis harta perkawinan dalam masyarakat Karo adalah :

- a). Harta pusaka. Yang disebut harta pusaka di dalam rumah tangga ialah rumah adat, *sapo page* (tempat penyimpanan padi), pisau *rempu pirak*, gelang *sarung*, sawah dan *reba* (kebun) dan ternak yang terdiri dari ; lembu, kerbau dan kuda.³¹
- b). Harta pembujangan dan penantian.³² Harta *penjayon* (pembujangan) ini, diberikan oleh orang tua laki-laki ke dalam rumah tangga, yang umumnya terdiri dari *kudin pendakanen* (periuk dan kual), dan padi sekitar 3 (tiga) karung. Dengan

³¹Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, *op. cit.*, h.. 40

³²*Ibid.*

pengertian bahwa alat dan pembekalan ini, adalah bekal dasar mereka untuk membangun rumah tangganya, sebab dahulu kala jarang ada pemberian (*luah*) dari sanak keluarga ataupun kenalan seperti alat-alat rumah tangga (pemberian kado) dalam perkawinan seperti sekarang ini.

Pihak perempuan, ada juga yang membawa perhiasan ke dalam perkawinan, misalnya berupa emas, seperti : *kerabu*, *bura* (kalung), cincin dan sebagainya, yang berasal dari orang tua si perempuan. Barang-barang ini selama rumah tangga dalam keadaan rukun tetap menjadi harta rumah tangga, tetapi jika terjadi perceraian, harta ini (seluruhnya) kembali kepada pihak perempuan atau orang tua perempuan.

c). Harta serikat (harta pencaharian).³³ Harta serikat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat Karo. Karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan (kecuali harta rumah tangga) adalah milik suami. Harta rumah tangga (prabot-prabot rumah tangga), jika terjadi perceraian, akan dibagi dua sama rata antara suami dan isteri.

Dari ketiga harta dalam perkawinan di atas maka harta pusaka yang berhak mewarisi tanah *buat-buaten* maupun hak milik adalah anak laki-laki. Anak perempuan hanya mempunyai hak menggarap atau hak pakai seumur hidupnya. Jadi hak waris turun-temurun jatuh kepada anak laki-laki.³⁴

Jelasnya dalam masyarakat karo hak waris jatuh kepada anak laki-laki. Sementara anak perempuan tidak mendapat hak waris. Tapi

³³*ibid.*

³⁴*Ibid.*, h. 47

banyak juga kejadian anak laki-laki berdasar *keleng ate* (kasih sayang) memberikan sebidang tanah kepada saudara perempuannya sampai ia meninggal dunia. Kalau saudara perempuan meninggal dunia maka pemberian tadi ditarik kembali. Terkecuali anak laki-laki dari saudara perempuan tadi mengawini anak dari saudara laki-laki yang mempunyai hak waris. Sebab anak perempuannya itu dikawini oleh iparnya sendiri. Namun demikian tergantung kepada anak laki-laki dari pemegang waris.³⁵

Kalau anak dari seseorang semua perempuan, maka umumnya anak-anak perempuan dapat memakai tanah atau benda lain dari orang tuanya sampai akhir hayatnya. Baru setelah anak-anak perempuan ini meninggal semua dan anak laki-laki mereka tidak ada yang kawin dengan anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki ibunya dikenal "*sembuyak bapa*" atau "*sembuyak nini*" (bapak atau nenek bersaudara), maka harta warisan akhirnya jatuh kepada saudara laki-laki yang senenek tadi.³⁶ Memang kasus harta warisan inilah sering menimbulkan sengketa dan bahkan sampai ke Pengadilan.

Demikian juga lahirnya putusan Mahkamah Agung tahun 1961 mengenai hak waris yaitu anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama, menimbulkan kehebohan pada masyarakat Karo. Ada pro tapi juga banyak kontra berdasar alasan masing-masing sehingga atas prakarsa Bupati Dati II Karo Letnan Kolonel Matang Sitepu, April tahun

³⁵Tridah Bangun, *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 1986), h. 101.

³⁶*Ibid.*

1962 di Kabanjahe diadakan seminar hak waris yang dihadiri Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro.³⁷

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Nopember 1961, Nomor 179 K/Sip/1961 mengenai warisan Batak Karo. Yang oleh Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan pada masyarakat Karo juga telah ditetapkan diperkokoh kedudukannya menjadi ahli waris. Dalam hal ini memang menyimpang dari hukum kewarisan adat Ilama. Dan dalam pertimbangannya tersebut, berdasar selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, diambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia. Bahwa anak perempuan dan laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam artian mereka adalah sama.

Tanggapan yang pro (setuju) terhadap Putusan Mahkamah Agung diantaranya : Ny. Djamin Gintings (isteri almarhum Letjen Djamin Ginting's), dia menyambut keputusan Mahkamah Agung ini dengan penuh kelegaan. Namun demikian tidak dapat seluruhnya melepaskan tradisi yang telah mendarah daging dalam masyarakat Karo,³⁸ Seperti tanah adat, yaitu tanah *pemulihan*, yang merupakan milik suatu kampung, marga tanah dari suatu marga. Begitu juga dengan kampung-kampung lainnya di Tanah Karo, mempunyai marga tanah masing-masing.

Namun ia berkesimpulan bahwa :

- a. Prinsip setuju kepada Mahkamah Agung, harta adat ditunda.
- b. Harus dilakukan pendaftaran atas jenis-jenis harta adat.
- c. Laksanakan Undang-Undang dan hukum waris Nasional.

³⁷*Ibid.*

³⁸Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, *op. cit.*, h. 57-58.

Sedangkan tanggapan P. Tamboen melihat dari konsideran keputusan Mahkamah Agung, bahwa dari keputusan tersebut sudah ada suatu perkara antara anak laki-laki melawan pihak anak perempuan yang telah sampai pada tingkat kasasi. Dimana ia menyimpulkan sama dengan pendapat Linur Sembiring, yang pada prinsipnya menegaskan sebagai berikut : keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 tersebut, menurut hemat beliau adalah sangat terpuji sekali, karena dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Indonesia telah memajukan ketertiban hukum di daerah Karo. Ia juga merasa heran kenapa di daerah Karo, perempuan belum dianggap sama dengan laki-laki, sehingga perempuan harus tetap dibenamkan dalam lumpur kehidupannya. Seperti yang kita lihat pada negara-negara maju, perempuan merupakan faktor yang menentukan kehidupan suatu bangsa. Dari kenyataan tersebut, dengan mengadakan pandangan ke muka dan bukan seperti yang lazim kita lakukan memandang ke belakang, maka kami sepenuhnya dengan tegas menerima keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Nopember 1961 itu. Karena menurut dia, dengan demikianlah, jalan terdekat mencapai suatu masyarakat yang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu masyarakat tanpa penindasan.³⁹

Sedangkan pendapat yang kontra terhadap Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 tersebut adalah tanggapan DR.Masri Singarimbun, yang mana beliau tidak menyetujui keputusan Mahkamah Agung dikarenakan beberapa alasan, yaitu ia melihat latar belakang warisan dalam masyarakat Karo. Adapun latar belakang tidak diberikannya warisan kepada perempuan dari harta warisan yang

³⁹*Ibid.*, h. 76.

ditinggalkan orang tuanya adalah beliau mempersamakannya dengan pertanyaan kenapa dalam masyarakat Karo berlaku sistem patrilineal. Dan kedua pertanyaan tersebut sangat sukar dijawab.

Ilmu-ilmu sosial sangat miskin dengan hukum kausalitet. Tetapi penyelidikan-penyelidikan membuktikan bahwa sistem kekerabatan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem warisan. Penganut aliran evolusi yang unilinier berpendapat bahwa sistem kekerabatan berkembang mealui satu evolusi. Sistem matrilineal seperti yang berlaku di Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang tertua menurut teori ini. Setingkat diatasnya adalah sistem patrilineal dan tingkat yang tertinggi adalah sistem bilateral.

Menurut teori ini masing-masing sistem kekerabatan, didasarkan atas satu soal pokok, yaitu siapakah yang menjadi pemilik dari hartabenda. Pada taraf-taraf permulaan daripada perkembangan masyarakat manusia, para perempuan yang menjadi pemilik, kemudian diwariskan pula kepada perempuan, dengan demikian terbentuk sistem matrilineal. Dalam hal ini para perempuan yang memegang kekuasaan. Kemudian laki-laki mengadakan perjuangan untuk merebut hak itu. Yang kemudian diwariskannya pula kepada anak laki-laki, dan terbentuklah sistem patrilineal. Pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi tercipta sistem bilateral, dimana hak laki-laki dan perempuan di dalam harta benda dan warisan adalah sama. Penyelidik-penyelidik membuktikan bahwa teori ini tidak dapat dipertahankan. Banyak dapat dikemukakan contoh bahwa masyarakat yang mempunyai sistem bilateral lebih rendah tingkat peradabannya daripada masyarakat yang mempunyai sistem matrilineal.

Tetapi suatu hal yang menarik di dalam teori di atas, adalah suatu sistem kekerabatan berlatar kepada pewarisan harta benda. Dan penyelidikan-penyelidikan memang membenarkan bahwa hal ini mengandung kebenaran. Di dalam sistem matrilineal, warisan jatuh kepada anak perempuan, di dalam sistem patrilineal warisan jatuh ketangan anak laki-laki, dan di dalam sistem bilateral warisan jatuh ketangan anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

Pertanyaan-pertanyaan mengapa dalam masyarakat Karo, hanya laki-laki yang berhak sebagai ahli waris, dapat dijawab : Karena disana berlaku sistem patrilineal. Mengapa ada sistem patrilineal ? Hal ini sukar dijawab, kalau kita tidak ingin terjerumus kepada alasan-alasan spekulatif.

Maka beliau menyimpulkan bahwa setelah zaman kemerdekaan membuktikan bahwa masyarakat Karo bersama adat dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang terdapat di dalamnya cukup dinamis. Perkembangan masyarakat Karo, tidak dapat dikatakan ketinggalan di tengah-tengah perkembangan bangsa Indonesia pada umumnya, ke arah kemajuan di dalam segala bidang.

Beliau tidak berani mengadakan hipotesa bahwa masyarakat Karo, akan dan sudah berada dalam tingkat kemajuan yang lebih tinggi sekarang, sekiranya sistem warisnya telah diganti duapuluh tahun yang silam. Begitu juga jika sistem warisan Karo segera dirombak dewasa ini, desintegrasi sosial yang hebat akan berlangsung di tengah-tengah masyarakat ini.

Menurut pendapat kami hal ini tidaklah memberikan keuntungan kepada masyarakat Karo khususnya dan kepada bangsa Indonesia umumnya.

Berdasarkan analisa ini, maka beliau tidak dapat menyetujui keputusan Mahkamah Agung supaya juga di Tanah Karo, seorang anak perempuan khusus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan dari orang tuanya.⁴⁰

B. Kerangka Berpikir

Persepsi masyarakat tentang sesuatu sangat dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuan sesuai lingkungan sosial-kultural masyarakat yang bersangkutan. Persepsi yang positif tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat muslim Karo akan memungkinkan timbulnya sikap perilaku yang positif pula untuk mengakui perempuan sebagai ahli waris. Realisasinya akan memberikan hak waris kepada perempuan (baik anak perempuan maupun janda). Sedangkan persepsi yang negatif akan mendorong tumbuhnya sikap yang negatif pula untuk tidak mengakui perempuan sebagai ahli waris.

Persepsi menunjuk pada bagaimana masyarakat melihat, mendengar, merasakan, mengecap dan mencium dunia luar di sekitarnya, sehingga persepsi timbul disebabkan sesuatu yang dialaminya. Sehingga persepsi terbentuk atas dasar data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diserap indera, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memory). Memory diolah kembali berdasarkan pengalaman, dan pengolahan ingatan ini mengacu pada suatu elaborasi, transformasi dan kombinasi berbagai input.

Dalam psikologi pendidikan persepsi mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing

⁴⁰*Ibid.*, h. 70.

rangsangan. Dengan adanya kemampuan untuk mengadakan diskriminasi ini akan menunjukkan kesadaran⁴¹

Persepsi merupakan aspek perilaku dalam klasifikasi tujuan pendidikan masuk kepada ranah psikomotorik, yaitu ranah ini bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap, sebagai tujuan yang prioritas.

Untuk perubahan perilaku atau sikap ini Bloom dkk. dan E. Simpson telah membuat klasifikasi tujuan pendidikan dalam tiga ranah (domain) atau kawasan yaitu ranah kognitif (*cognitif*), afektif (*affectif*) dan psikomotor (*psychomotor*) yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

Pertama, Ranah Kognitif. Ranah ini adalah mencakup tujuan sehubungan dengan kemampuan intelektual dan keterampilan. Tujuan perilaku ranah kognitif ini perlu diperhatikan oleh karena kedua tujuan perilaku berikutnya (afektif dan psikomotorik) adalah dibangun dengan menggunakan perilaku dari ranah kognitif ini.

Kedua, Ranah Afektif. Ranah ini yaitu yang mencakup tujuan yang menggambarkan perubahan keadaan emosi, perhatian utama, nilai sikap, pengembangan pemahaman dan penyesuaian yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan.

Ketiga, Ranah Psikomotorik. Ranah ini yaitu yang berkaitan dengan keterampilan motorik. Apabila tujuan pembahasan sikap dari suatu program adalah untuk dapat memberikan persepsi yang positif, dan menjadi perilaku terbiasa dilakukan dengan kesadaran, maka ranah psikomotorik merupakan tujuan yang prioritas. Dengan demikian, untuk mencapai persepsi yang positif maka ranah kognitif dan afektif mestilah jelas.

Tingkatan-tingkatan diatas seperti yang ada di dalam tabel berikut :

⁴¹W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), h. 249.

Tabel 1.
Sistematika Aspek Jenis Perilaku Dalam Kalsifikasi Tujuan Pendidikan

Ranah Kognitif	Ranah Afektif	Ranah Psikomotorik
1. Pengetahuan	1. Penerimaan	1. Persepsi
2. Pemahaman	2. Partisipasi	2. Kesiapan
3. Penerapan	3. Penilaian	3. Gerakan terbimbing
4. Analisa	4. Organisasi	4. Gerakan terbiasa
5. Sintesa	5. Pembentukan pola	5. Gerakan kompleks
6. Evaluasi	hidup	6. Penyesuaian pola gerakan
		7. Kreativitas ⁴²

Sumber : Winkel, 1996 : 245

Untuk melihat kesadaran masyarakat tentang hukum kewarisan, termasuk didalamnya kewarisan hukum Adat dan Islam. Dimana hukum adat dan Islam memiliki taraf sejajar dalam daya berlakunya di Indonesia. Daya berlaku suatu sistem hukum disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini maka akan tampak bahwa di antara sistem hukum Adat dan Islam terdapat kemungkinan berlaku sejalan dalam suatu masyarakat tertentu.⁴³

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat. Oleh sebab itu maka hukum Adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam perkembangan itulah maka dapat diperkirakan bahwa hukum Adat akan terpengaruh oleh *hukum Islam, faktor struktur sosial* dan *faktor proses sosial*.⁴⁴ Hukum Adat melahirkan kebiasaan atau adat istiadat

⁴²Ibid., h. 245.

⁴³Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung : Alumni, 1993, h. 25.

⁴⁴Ibid., h. 26.

karena yang pokok adalah kesadaran hukum yang ada. Lebih nyata lagi bahwa perkembangan tidak saja memperhatikan hukum Adat dari sudut pemuka adat, melainkan memperhatikan pula kesadaran hukum masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan hukum kewarisan di dalam masyarakat, maka sebagaimana ditegaskan pada ketetapan MPR No. II/1998, yaitu pada bagian Umum, arah dan kebijakan pembangunan pola umum pelita kelima, yang menyatakan :

kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung kemantapan stabilitas nasional. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan upaya pembaharuan hukum serta peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparatur pemerintah, terutama aparatur penegak hukum, serta ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.⁴⁵

Untuk mengetahui hukum mana yang merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat masa kini dan untuk masa akan datang, perlu dilakukan penelitian yang mendalam secara berkesinambungan.

Faktor-faktor seseorang mematuhi hukum dapat disebabkan ia takut terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum, atau karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya.

Hal itu erat kaitannya dengan masalah kepatuhan hukum dan kesadaran hukum. Dalam kepatuhan hukum seseorang mematuhi hukum dapat disebabkan faktor-faktor di atas. Sedangkan kesadaran hukum yang

⁴⁵*Ibid.*, h. 28.

berkaitan dengan dengan pengetahuan, pemahaman dan penghargaan atau sikap hukum seseorang atau warga masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum.

Dan setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁴⁶

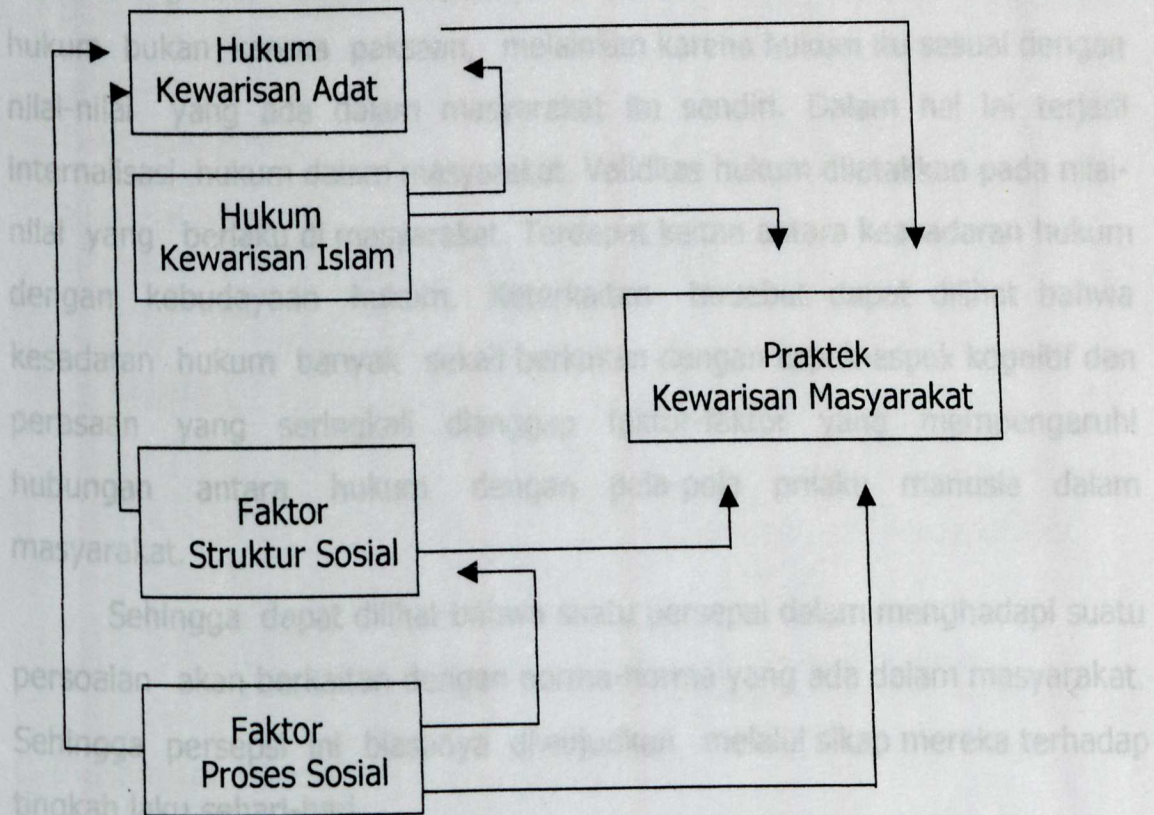
Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka kerangka konseptual lingkup kewarisan masyarakat adalah digambarkan berikut ini :

Faktor
Proses Sosial

Melihat skema di atas maka kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum disini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum disini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sebagai contoh hukum Islam dan hukum adat. Walaupun hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (hukum tertulis). Akan tetapi adalah suatu kenyataan, kedua sistem hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan hukum.

⁴⁶*Ibid.*, h. 30-31.

Gambar 1.
Skema Kerangka Konseptual Kewarisan Masyarakat



Melihat skema di atas maka kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum disini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum disini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sebagai contoh hukum Islam dan hukum adat. Walaupun hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (hukum tertulis). Akan tetapi adalah suatu kenyataan, kedua sistem hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

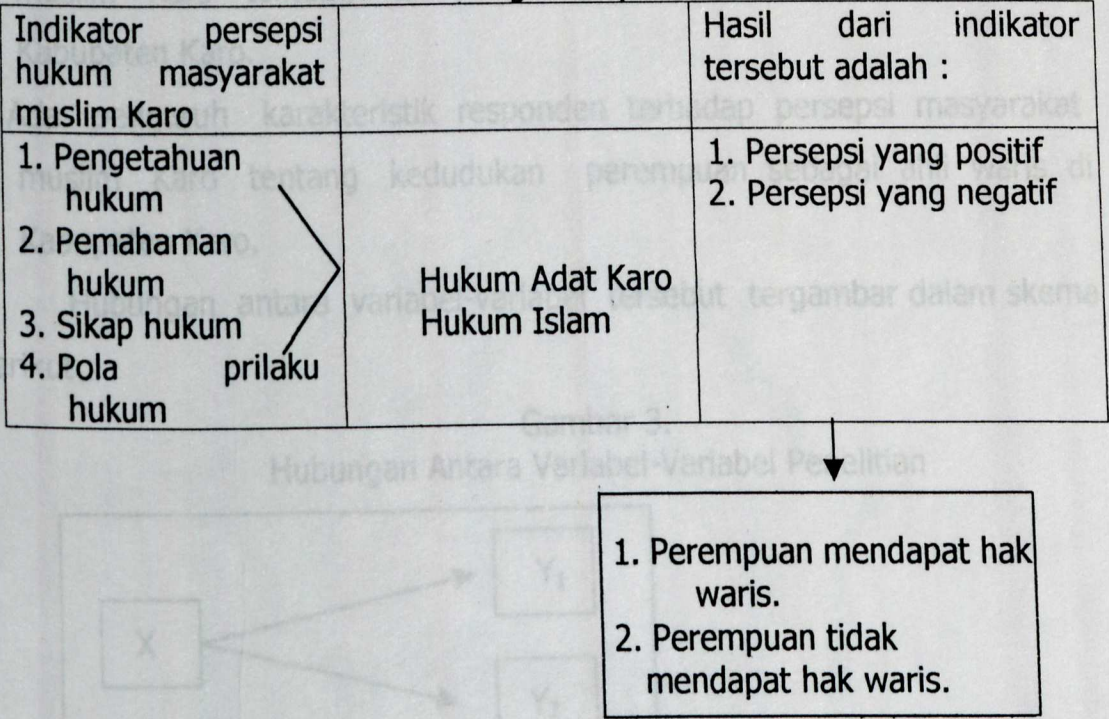
Sehingga dapat dilihat bahwa suatu persepsi dalam menghadapi suatu persoalan akan berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Secara ringkas kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut :

1. Terdapat perbedaan kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan Hukum Islam
2. Masyarakat muslim Karo memberikan kedudukan terhadap perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris adalah pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tentang hukum Adat dan Hukum Islam.
4. Kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo sadar, tertarik, penilaian, coba-coba, adopsi.

Gambar 2.

Skema Kerangka Berpikir Penelitian



C. Pengajuan Hipotesis

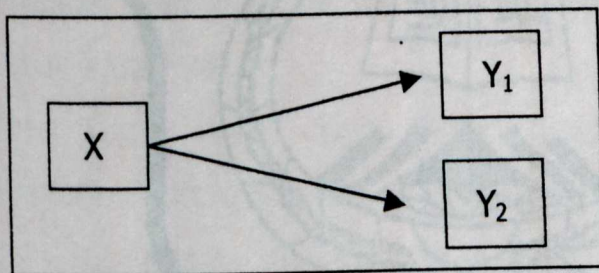
Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

- 1. Terdapat perbedaan kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan Hukum Islam
- 2. Masyarakat muslim Karo memberikan kedudukan terhadap perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris adalah pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tentang hukum Adat dan Hukum Islam.
- 4. Kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo sadar, tertarik, penilaian, coba-coba,adopsi.

5. Ada hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.
6. Ada pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut tergambar dalam skema berikut :

Gambar 3.
Hubungan Antara Variabel-Variabel Penelitian



Keterangan :

X : Pengetahuan hukum masyarakat muslim Karo

Y₁ : Kedudukan perempuan sebagai ahli waris

Y₂ : Persepsi masyarakat muslim Karo

→ : Arah kontribusi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo wilayah Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo yang ibukotanya Kabanjahe, dengan ketinggian sekitar 700-1420 meter di atas permukaan laut.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah dua desa yang ada di Kabupaten Karo. Dipilihnya dua desa tersebut berdasarkan kriteria jumlah penduduk yang mayoritas dan minoritas beragama Islam, sehingga dapat diukur pengamalan agama serta persepsi mereka tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo. Adapun kedua desa tersebut adalah yaitu :

1. Desa Gung Pinto. Gung Pinto merupakan desa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk 320 KK (Kepala Keluarga), dan hanya 20 KK (Kepala Keluarga) yang beragama non Islam.
2. Desa Beganding. Adapun desa ini berpenduduk mayoritas non Islam, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk 800 KK (Kepala Keluarga), yang beragama Islam hanya 150 KK (Kepala Keluarga).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh masyarakat muslim Karo yang menetap di Kabupaten Karo. Untuk menentukan jumlah populasi yang diteliti maka diambil dari ~~dua~~ desa. Dimana sebagai sampel diambil sebanyak 60 orang, yaitu 30 orang dari desa yang mayoritas beragama Islam, yaitu Desa Gung Pinto. Sedangkan dari desa yang beragama minoritas Islam yaitu Desa Beganding, juga diambil 30 orang.

Adapun tehnik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Untuk itu pemilihan desa yang mayoritas Islam ternyata mempunyai penduduk 320 KK dan yang beragama Islam 280 KK (87,5 %). Desa minoritas Islam,pendudukny, adalah 800 KK dan yang memeluk Islam adalah 150 KK (18,8 5).

Berdasarkan data sekunder bahwa umur rata-rata lama memeluk agama Islam adalah rata-rata 30 tahun. Populasi di desa yang mayoritas Islam ternyata 131 orang yang kurang dari 30 tahun, sedangkan 149 orang lebih dari 30 tahun. Dengan mengambil sampel 30 orang secara proporsional strata pertama adalah 14 orang dan strata kedua 16 orang.

Sedangkan desa minoritas strata satu 70 orang, strata dua 80 orang. Maka secara proporsional untuk sampel 30 orang, strata satu 14 orang dan strata dua 16 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Sampling

No	Strata Lama Memeluk Islam (tahun)	Populasi		Sampel	
		Desa Gung Pinto (orang)	Desa Beganding (orang)	Desa Gung Pinto (orang)	Desa Beganding (orang)
01	< 30	131	70	14	14
02	> 30	149	80	16	16
	Jumlah	280	150	30	30

C. Defenisi Operasional

Adapun defenisi oprasional penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. *Jenis Kelamin*. Jenis kelamin adalah jenis kelamin Responden laki-laki dan perempuan.
2. *Status Sipil*. Status sipil adalah status Responden menikah, duda atau janda pada saat menjadi Responden.

3. *Umur*. Umur adalah usia (dalam tahun) responden pada saat menjadi Responden.
4. *Pekerjaan*. Pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari sebagai mata pencaharian dari Responden.
5. *Jumlah anggota keluarga*. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga Responden. Jumlah anggota keluarga disini adalah yang merupakan tanggungan keluarga
6. *Pendidikan*. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti oleh Respomden.
7. *Lama memeluk agama Islam*. Lama memeluk agama Islam adalah sejak usia Responden masuk Islam sampai usia ketika menjadi Responden.

D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah metode survei, dengan menggunakan instrumen penelitian kuisisioner (Daftar Pertanyaan) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dengan pengamatan langsung.

Pengambilan data dari variabel karakteristik responden, pengetahuan (X^1), persepsi (X^2), serta kedudukan pereempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo (Y) diambil melalui sebaran kuisisioner skala likert yang diuji berdasarkan indikator, sedangkan jenis datanya adalah berbentuk interval. Masing-masing jawaban dari item kuisisioner diberi skor 5, 4, 3, 2, 1 untuk jawaban positif, dan 1, 2, 3, 4, 5 untuk jawaban negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Butir Pertanyaan	Jumlah
	- Jenis Kelamin	1	1
	- Status Sipil	2	1
	- Umur	3	1

1. Karakteristik masyarakat muslim Karo	- Pekerjaan	4	1
	- Jumlah Anggota Keluarga	5	1
	- Tingkat Pendidikan	6	1
	- Lama memeluk agama Islam	7	1
2. Pengetahuan masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan Hukum Islam	- Pengetahuan terhadap hukum waris Adat	1,2	2
	- Pengetahuan terhadap hukum waris Islam		
3. Persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	- Sikap hukum masyarakat muslim Karo terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris di kabupaten Karo	8, 9	2
4. Pemahaman Hukum Adat dan Hukum Islam masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris	- Pelaksanaan pembagain waris menurut hukum Adat dan Hukum Islam dalam masyarakat muslim Karo	10,11, 12, 13, 14,	5

E. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan skunder. Data primer yang dimaksudkan adalah berupa hasil wawancara dan kuisisioner langsung dengan para responden. Wawancara ini dicatat berdasarkan angket yang disusun menurut pertanyaan yang sesuai

dengan kebutuhan data yang digunakan. Sedangkan data skunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berbagai sumber kepustakaan dan referensi-referensi lain, seperti artikel, jurnal ataupun hasil seminar yang dapat menunjang sepenuhnya penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk hipotesis nomor satu sampai empat dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini akan dianalisis perbedaan kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan hukum Islam. bagaimana pula kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut masyarakat muslim Karo, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris, dan menjelaskan kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris.
2. Untuk hipotesis nomor lima dianalisis hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, melalui analisis korelasi sederhana (*simple correlation analysis*), dengan rumus :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \mu$$

Keterangan :

\hat{Y} = Kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi

X_1 = Persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris

μ = Error item

Dalam pengajuan hipotesis ini, didasarkan dari hasil penghitungan nilai t (korelasi). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan derajat bebas $\alpha 5 \%$ maka ada pengaruhnya. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat bebas $\alpha 5 \%$ maka tidak ada pengaruhnya.

3. Untuk hipotesis nomor enam dianalisis pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, dipergunakan analisis regresi linier, berganda, dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan :

Y	= Karakteristik Responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat kabupaten Karo.
a	= Konstanta
b	= Koefisien regresi
X ₁	= Jenis kelamin
X ₂	= Status Sipil
X ₃	= Umur
X ₄	= Pekerjaan
X ₅	= Jumlah anggota keluarga
X ₆	= Pendidikan
X ₇	= Lama memeluk agama Islam
E	= Error item

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Daerah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo wilayah Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo yang beribukota Kabanjahe, dengan ketinggian sekitar 1.220 meter di atas permukaan laut.

Lokasi penelitian ini dipilih Kecamatan Simpang Empat. Adapun kecamatan Simpang Empat secara porposif memiliki desa yang mayoritas penduduknya Islam dan desa yang minoritas Islam (diperoleh dari penelitian pendahuluan), sehingga dapat diukur pengamalan agama serta persepsi mereka tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.

Adapun untuk menentukan desa sampel, diambil dari desa-desa yang mempunyai sarana ibadah mesjid tapi tidak ada sarana ibadah gereja yang merupakan sampel desa mayoritas penduduk Islam. Berdasarkan data statistik, ada 6 desa yang dimaksud yaitu Tiga Pancur, Pintu Besi, Torong, Gongsol, Bekerah, dan Gung Pinto. Masing-masing desa tersebut memiliki mesjid satu buah. Untuk itu terpilih desa Gung Pinto. Adapun desa yang minoritas Islam yaitu yang banyak sarana ibadah gereja dan sedikit mesjid, untuk itu ada tiga desa yaitu Beganding, Lingga, dan Berastepu. Masing-masing desa tersebut memiliki tiga buah gereja. Untuk itu terpilih desa Beganding.¹

Kriteria lain terpilihnya kedua desa tersebut sebagai sampel penelitian ini diambil berdasarkan jarak dari ibu kota kecamatan ke desa lokasi penelitian, maka kedua desa sampel penelitian tersebut berjarak pada

¹Sumber Data KUA Kecamatan Simpang Empat, Tahun 2004

pertengahan. Artinya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari ibu kota kecamatan. Hal ini dapat dilihat data lampiran.

Adapun kedua desa tersebut adalah yaitu :

1. Desa Gung Pinto. Gung Pinto merupakan desa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dengan jumlah penduduk ± 300 KK (Kepala Keluarga), dan hanya 20 KK (Kepala Keluarga) yang beragama non Muslim.
2. Desa Beganding. Adapun desa ini berpenduduk mayoritas non Islam, dengan jumlah penduduk ± 800 KK (Kepala Keluarga), yang beragama Islam hanya 150 KK (Kepala Keluarga).

Desa Gung Pinto memiliki sarana perhubungan dan transportasi dengan panjang jalan berupa jalan yang diperkeras serta jalan setapak, dan tidak memiliki jalan aspal. Sarana transportasi hanya ada 1 mobil angkutan penumpang dari desa tersebut ke Berastagi sekali dalam sehari. Dan diluar dari jam keberangkatan angkutan tersebut maka harus menempuh jalan kaki sejauh ± 4 km dari persipangan desa Naman, yang merupakan desa persimpangan antara ibukota kecamatan ke Objek Wisata Danau Lau Kavar. Daerah ini masih merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 700 – 1420 meter di atas permukaan laut. Desa Gung Pinto jaraknya dari Ibukota Kabupaten (Kabanjahe) 26 km. Luas Desa Gung Pinto adalah 8, 12 km².

Sedangkan Desa Beganding memiliki sarana perhubungan dan transportasi dengan sarana jalan aspal dan diperkeras. Memiliki transportasi kendaraan umum sebanyak 4 buah, yang setiap harinya pulang pergi dari desa tersebut ke ibukota Kabupaten (Kabanjahe), untuk mengantar penduduk dan membawa hasil pertaniannya untuk dijual. Desa ini juga merupakan dataran tinggi dengan ketinggian bervariasi antara 700–1.420 meter di atas permukaan laut. Jarak dari desa ini ke Ibukota Kabupaten

(Kabanjahe) 17 Km dan luas desa Beganding 8,98 km².

Jumlah penduduk Kecamatan Simpang Empat sejumlah 35.412 jiwa, terdiri dari 17.481 jiwa laki-laki dan 17.931 jiwa perempuan.

Adapun Desa Gung Pinto memiliki penduduk sejumlah 403 jiwa dengan rincian 200 jiwa laki-laki dan 203 jiwa perempuan. Sedangkan Desa Beganding memiliki penduduk sejumlah 1.509 jiwa, yang terdiri dari 755 jiwa laki-laki dan 754 jiwa perempuan.

Bila dibandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah masing – masing desa, kepadatan penduduknya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 4.

Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut desa di Daerah Penelitian, Tahun 2004.

No.	Nama Desa	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1.	Gung Pinto	8,12	403	19,63
2.	Beganding	8,98	1.508	168,04

S u m b e r : Kantor BPS Kec. Simpang Empat Kabupaten Karo Tahun 2004.

B. Identitas Responden

Adapun identitas responden dalam penelitian ini meliputi 7 karakteristik, yaitu karakteristik masyarakat muslim Karo di Kabupaten Karo, yang meliputi : jenis kelamin, status sipil, umur, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan lama memeluk agama Islam.

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin masyarakat muslim Karo yang dijadikan sebagai responden adalah laki-laki dan perempuan. Jumlah responden keseluruhan adalah 60 orang, dengan rincian laki-laki 31 orang yaitu 51,7 % dan perempuan 29 orang yaitu 48,3 %. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	31	51,7
2	Perempuan	29	48,3
	Jumlah	60	100,0

Sumber : Data Primer (olahan), 2004

2. Status Sipil

Status sipil responden dalam penelitian ini kebanyakan adalah menikah sebanyak 53 orang yaitu 88,3 % dan sisanya janda/duda sebanyak 7 orang yaitu 11,7 %. Hal itu tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 6

Identitas Responden Berdasarkan Status Sipil

No	Status Sipil	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Menikah	53	88,3
2	Duda/Janda	7	11,7
	Jumlah	60	100,0

Sumber : Data Primer (olahan), 2004

3. Umur

Umur salah satu unsur yang mempengaruhi seseorang dalam memilih dan menerima inovasi yang diberikan padanya adalah faktor umur. Umur yang relatif muda lebih cenderung untuk cepat menerima inovasi.

Umur masyarakat muslim Karo sebagai responden dalam penelitian ini, umur yang paling banyak adalah pada usia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (33,3%), selanjutnya usia 41 - 50 tahun sebanyak 18 orang (30,0 %), usia 21 - 30 tahun sebanyak 10 orang (16,6 %). Usia 51 - 60 tahun sebanyak 7 orang (11,7 %) dan usia 61 – 70 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %). Sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia yang terendah yakni 20 tahun dan usia yang tertinggi yakni 81 tahun masing-masing sebanyak 1

orang (1,7 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	0 - 20	1	1,7
2	21 - 30	10	16,6
3	31 - 40	20	33,3
4	41 - 50	18	30,0
5	51 - 60	7	11,7
6	61 - 70	3	5,0
7	71 - 80	1	1,7
	Jumlah	60	100,0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

4. Pekerjaan

Dari 60 orang responden, 46 orang (76,70 %) pekerjaan bertani kemudian pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 8 orang (13,30 %), selanjutnya PNS sebanyak 4 orang (6,7 %) dan lain-lain (pensiunan PNS) sebanyak 2 orang (3,3 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 8.

Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	46	76,7
2	Pedagang	8	13,3
3	Buruh	0	0
4	PNS	4	6,7
5	ABRI	0	0
6	Lain-lain	2	3,3
	Jumlah	60	100,0

Sumber : Data Primer (olahan), 2004

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan responden mayoritas adalah petani, yaitu 46 orang (76.67 %).

5. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga merupakan tanggungan keluarga juga akan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan harta warisan. Hubungan ini memang tidak langsung. Semakin besar tanggungan, maka semakin sedikit harta warisan yang diperoleh.

Tanggungan keluarga responden yang paling banyak berada pada jumlah 3-4 orang sebanyak 23 responden (38,33 %), disusul jumlah tanggungan antara 5-6 orang sebanyak 13 responden (21,7 %), disusul jumlah tanggungan 7 orang sebanyak 5 responden (8,33%) dan paling sedikit responden yakni 1 orang (1,67 %) mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 orang.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9.
Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

No	Jumlah Anggota Keluarga (orang)	Jumlah (keluarga)	Persentase (%)
1	1	2	3,33
2	2	4	6,67
3	3	14	23,33
4	4	9	15,00
5	5	13	21,67
6	6	12	20,00
7	7	5	8,33
8	8	0	0
9	9	1	1,67
	Jumlah	60	100,00

Sumber : Data Primer (olahan), 2004

6. Pendidikan

Pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam mengadopsi inovasi yang ada. Semakin tinggi pendidikan seseorang, akan relatif lebih cepat dan menerima inovasi.

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah lulus SLTA sebanyak 21 orang (35 %) dan paling sedikit adalah responden yang tidak pernah sekolah sebanyak 1 orang (1,67 %) . Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 10.
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	1	1,67
2	Pendidikan Dasar	11	18,33
3	SMTp	18	30,00
4	SMTA	21	35,00
5	Perguruan Tinggi	9	15,00
	Jumlah	60	100,00

Sumber : Data Primer (olahan), 2004

7. Lama Memeluk Agama Islam

Lama memeluk agama Islam akan mempengaruhi dalam mengadopsi inovasi yang ada. Semakin lama memeluk agama Islam, akan relatif lebih cepat dan menerima inovasi.

Dari 60 orang responden, masa responden yang paling lama memeluk agama Islam adalah pada masa 11 – 20 tahun, yaitu sebanyak 16 orang (26,7 %), selanjutnya pada masa 21 - 30 tahun sebanyak 15 orang (25,0 %), pada masa 31 - 40 tahun sebanyak 14 orang (23,3 %), 41 – 50 tahun sebanyak 9 orang (15,0 %), Usia 51 - 60 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %) Sedangkan pada masa yang paling belakangan memeluk agama Islam yang sekaligus responden yang paling sedikit adalah pada masa 1 – 10 tahun

sebanyak 3 orang (5,0 %). Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 11.

Jumlah Responden Berdasarkan Lama Memeluk Agama Islam

No	Lama Memeluk Agama Islam (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1 – 10	3	5,0
2	11 – 20	16	26,7
3	21 – 30	15	25,0
4	31 – 40	14	23,3
5	41 – 50	9	15,0
6	51 - 60	3	5,0
	Jumlah	60	100,0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

C. Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Masyarakat Karo menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Untuk melihat kedudukan perempuan dalam masyarakat Karo adalah melihat dari dua hukum yang berlaku, yakni : (1) keberadaan hukum adat yang berlaku dan (2) keberadaan hukum Islam yang berlaku. Untuk melihat keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat Karo dalam hal kedudukan perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini :

Tabel. 12

Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat

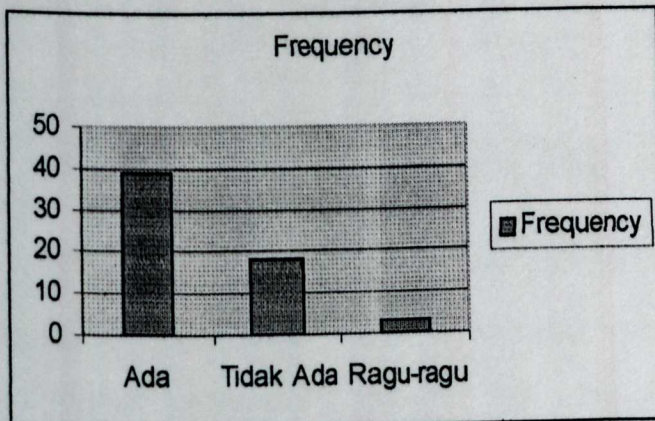
		Frequency	Percent
Valid	Ada	39	65.0
	Tidak Ada	18	30.0
	Ragu-ragu	3	5.0
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam

masyarakat Karo menurut hukum Adat adalah terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar. 4
Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat



Melalui tabel 12 dan gambar 4 di atas dapat dinyatakan bahwa ada sekitar 39 orang responden atau sebesar 65% yang mengakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat, dan 30% menyatakan perempuan bukan sebagai ahli waris menurut hukum dan sisanya sebesar 5% ragu-ragu terhadap perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat.

Sedangkan untuk melihat keberadaan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Karo dalam hal kedudukan perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 13.
Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Islam

		Frequency	Percent
Valid	Ada	49	81.7
	Tidak Ada	2	3.3
	Ragu-ragu	9	15.0
	Total	60	100.0

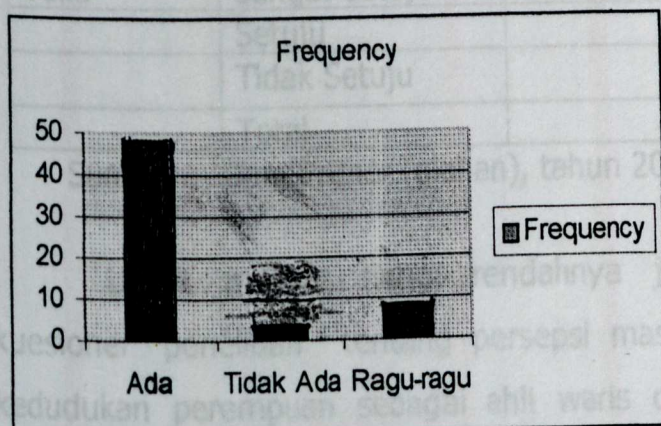
Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam

masyarakat Karo menurut hukum Adat adalah terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar. 5

Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Islam



Melalui tabel 13 dan gambar 5 di atas maka diperoleh bahwa kebanyakan responden atau sebesar 81,7% menyatakan bahwa perempuan dapat ahli waris menurut hukum Islam, sebesar 3,3% menyatakan kedudukan perempuan bukan sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan sebesar 15% menyatakan ragu-ragu tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam.

D. Persepsi Masyarakat Muslim Karo tentang Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris

Untuk melihat persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris adalah melihat dari dua sikap responden yang berlaku, yakni : (1) Sikap responden jika harta warisan diberikan kepada anak Perempuan (2) Sikap responden jika harta warisan diberikan kepada Janda. Untuk melihat Sikap Responden Jika Harta Warisan diberikan kepada Anak Perempuan yang berlaku di masyarakat Karo dalam hal kedudukan

perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini :

Tabel 14.

Sikap Responden Jika Harta Warisan diberikan kepada Anak Perempuan

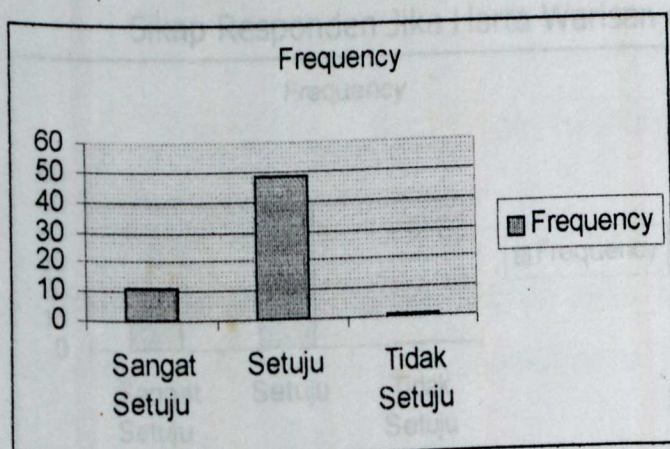
		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	11	18.3
	Setuju	48	80.0
	Tidak Setuju	1	1.7
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo adalah melalui sikap responden tersebut jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 6.

Sikap Responden Jika Harta Warisan diberikan kepada Anak Perempuan



Melalui tabel 14 dan gambar 6 di atas maka dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kebanyakan setuju atas pernyataan jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan 80,0% serta sangat setuju sebesar 18,3% kemudian tidak setuju sebesar 1,7% serta sangat tidak setuju tidak ada.

Sedangkan untuk melihat sikap responden jika harta warisan diberikan

kepada janda yang berlaku di masyarakat Karo dalam hal kedudukan perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini :

Tabel 15.

Sikap Responden Jika Harta Warisan diberikan kepada Janda

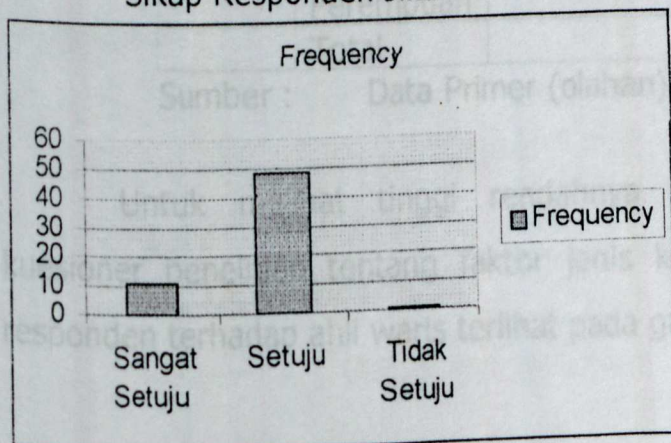
		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	7	11.7
	Setuju	49	81.7
	Tidak Setuju	4	6.6
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo melalui sikap responden jika harta warisan diberikan kepada janda, terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 7.

Sikap Responden Jika Harta Warisan diberikan kepada Janda



Melalui tabel 15 dan gambar 7 di atas, maka diperoleh hasil atas kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam menyatakan bahwa kebanyakan responden menyatakan setuju jika harta responden diberikan kepada janda yaitu sebesar 81,7% dan sangat setuju sebesar

2x4.4
KUR
\$ e.1

11,7% kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 6,7%.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat dari 7 hal, yakni (1) jenis kelamin, (2) status sipil, (3), umur, (4) pekerjaan, (5) Jumlah anggota keluarga, dan (6) tingkat pendidikan, serta (7) lama memeluk agama Islam.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah laki-laki sebanyak 31 orang (52 %) dan perempuan sebanyak 29 orang (48 %). Hal ini dapat terlihat dalam tabel 16 berikut :

Tabel 16.
Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	Laki-Laki	31	51.7
	Perempuan	29	48.3
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

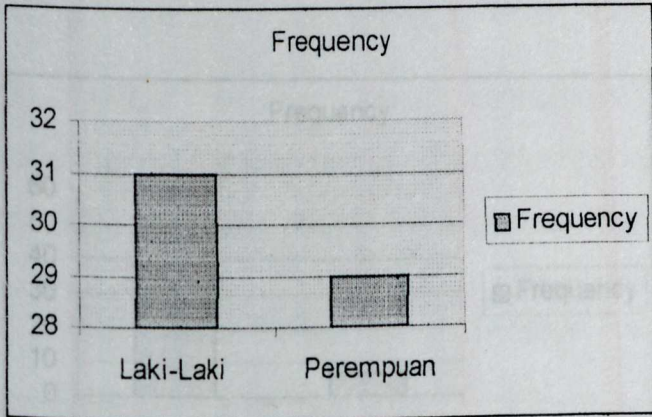
Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor jenis kelamin mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor status sipil mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 8.

Faktor Jenis Kelamin Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris



Melalui tabel 16 dan gambar 8 di atas, maka diperoleh bahwa hampir sama antara jumlah laki-laki yaitu sebesar 51,7% dan jumlah perempuan sebesar 48,3% dari jumlah sampel penelitian yang digunakan.

2. Status Sipil

Kebanyakan jumlah responden status sipil adalah yang sudah menikah yaitu sebanyak 53 orang (88,3 %) dan sisanya sebanyak 7 orang (11,7 %) adalah mereka yang sudah duda atau janda. Hal ini dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini :

Tabel 17
Status Sipil

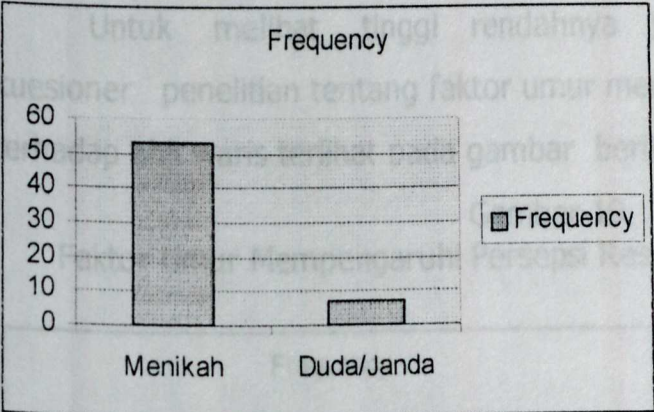
		Frequency	Percent
Valid	Menikah	53	88.3
	Duda/Janda	7	11.7
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor status sipil mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 9.
Faktor Status Sipil Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004



Melalui tabel 17 dan gambar 9 di atas, dapat ditetapkan bahwa kebanyakan jumlah sampel dengan yang sudah menikah yaitu sebesar 88,3% dan 11,7 % yang sudah duda atau janda.

3. U m u r

Umur responden yang paling banyak adalah pada usia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (33,3%), selanjutnya usia 41 - 50 tahun sebanyak 18 orang (30,0 %), usia 21 - 30 tahun sebanyak 10 orang (16,7 %). Usia 51 - 60 tahun sebanyak 7 orang (11,6 %) dan usia 61 – 70 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %). Sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia yang terendah yakni 20 tahun dan usia yang tertinggi yakni 81 tahun masing-masing sebanyak 1 orang (1,7 %). Hal ini dapat dilihat dalam tabel 18 berikut ini :

Tabel 18.
Umur

		Frequency	Percent
Valid	0 – 20 tahun	1	1.7
	21-30 tahun	10	16.7
	31-40 tahun	20	33.3
	41-50 tahun	18	30.0
	51-60 tahun	7	11.6
	61-70 tahun	3	5.0

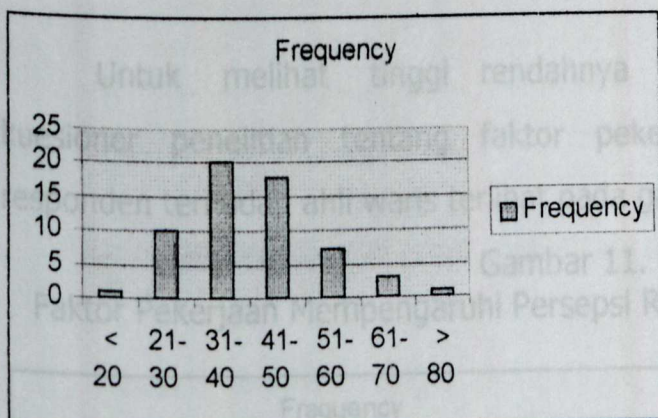
	71-80 tahun	1	1.7
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor umur mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 10.

Faktor Umur Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris



Melalui tabel 18 dan gambar 10 di atas, diperoleh dari tabel tersebut bahwa kebanyakan sampel penelitian berada pada umur setengah baya yaitu pada umur 31-40 tahun sebesar 33%, disusul dengan pada tingkat umur 41-50 tahun sebesar 30%, pada tingkat umur 21-30 tahun sebesar 16,7%, dan tingkat umur 51-60 sebesar 11,6%. Sedangkan umur yang paling muda adalah umur yang tua sekali dan yang muda yaitu pada tingkat umur < 20 tahun dan > 80 tahun masing-masing diperoleh sebesar 1,7%.

4. Pekerjaan

Responden yang terbanyak adalah sebesar 46 orang (76.7 %) bekerja sebagai petani kemudian pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 8 orang (13,3 %), selanjutnya PNS sebanyak 4 orang (6,7 %) dan lain-lain (pensiunan PNS) sebanyak 2 orang (3,3 %). Hal ni dapat dilihat dalam tabel

19 berikut ini :

Tabel 19.
Pekerjaan

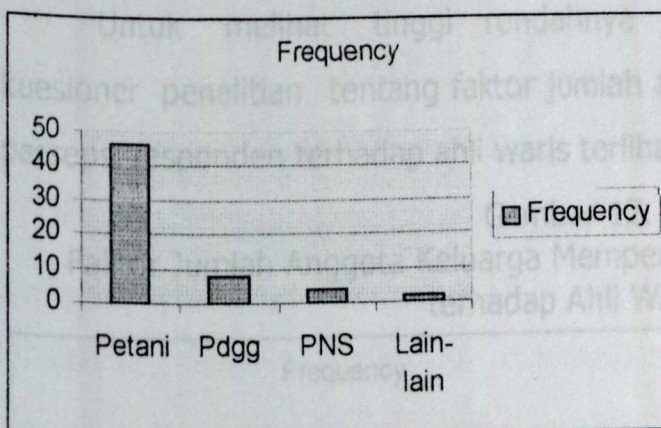
		Frequency	Percent
Valid	Petani	46	76,7
	Pedagang	8	13,3
	PNS	4	6,7
	Lain-lain	2	3,3
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor pekerjaan mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 11.

Faktor Pekerjaan Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris



Melalui tabel 19 dan gambar 11 di atas, diperoleh bahwa kebanyakan masyarakat yang disampel adalah dengan pekerjaan petani yaitu sebanyak 76,7%, kemudian pekerjaan pedagang sebesar 13,3% PNS sebesar 6,7% serta pekerjaan lainnya sebesar 3,3%.

5. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang paling banyak berada pada jumlah 3 – 4 orang sebanyak 23 responden (38,3 %), disusul jumlah tanggungan

antara 5 – 6 orang sebanyak 26 responden (43,4 %) dan paling sedikit responden yakni 1 orang (1,7 %) mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini :

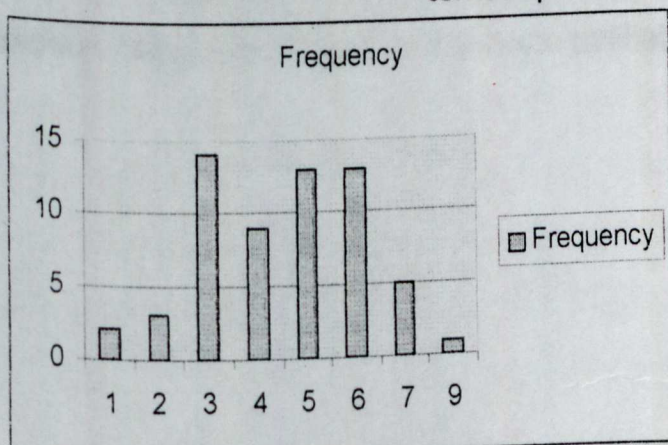
Tabel 20.
Jumlah Anggota Keluarga

		Frequency	Percent
Valid	1	2	3,3
	2	3	5,0
	3	14	23,3
	4	9	15,0
	5	13	21,7
	6	13	21,7
	7	5	8,3
	9	1	1,7
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor jumlah anggota keluarga mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 12.
Faktor Jumlah Anggota Keluarga Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris



Melalui tabel 20 dan gambar 12 di atas, diperoleh bahwa kebanyakan anggota keluarga masyarakat karo tidak terlalu banyak yaitu sekitar 3-6

orang, dan jumlah anggota keluarganya 1, 2, 7 dan 8,9 orang jarang dijumpai di masyarakat karo.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah lulus SLTA sebanyak 22 orang (36,7 %) dan paling sedikit adalah responden yang tidak pernah sekolah sebanyak 1 orang (1,6 %). Hal ini dapat dilihat dalam tabel 21 berikut ini :

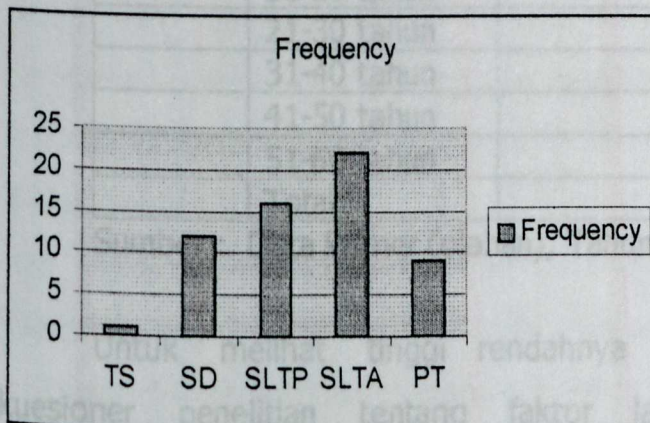
Tabel 21
Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent
Valid	Tidak Sekolah	1	1.6
	Pendidikan Dasar	12	20.0
	SLTP	16	26.7
	SLTA	22	36.7
	Perguruan Tinggi	9	15.0
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 13.
Faktor Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris



Melalui tabel 21 dan gambar 12 di atas, diperoleh dari responden bahwa kebanyakan masyarakat Karo sudah mengenal aksara karena kebanyakan masyarakatnya sudah tamat SLTA sekitar 36,7% kemudian disusul tamat SLTP sebesar 26,7%, tamat SD sebesar 20% serta tamat perguruan tinggi diperoleh sebesar 15% sedangkan tidak sekolah hanya 1,6%.

7. Lama Memeluk Agama Islam

Responden yang paling lama memeluk agama Islam adalah pada masa 11 – 20 tahun, yaitu sebanyak 16 orang (26,7 %), selanjutnya pada masa 21 – 30 tahun sebanyak 15 orang (25,0 %), pada masa 31 - 40 tahun sebanyak 14 orang (23,3 %). Usia 51 - 60 tahun sebanyak 7 orang (11,7 %) Sedangkan pada masa yang baru memeluk agama Islam yang sekaligus responden yang paling sedikit adalah pada masa 1 – 10 tahun dan masa yang paling lama sudah memeluk agama Islam yaitu 50 tahun masing-masing sebanyak 3 orang (5,0 %). Hal ini terlihat dalam tabel 22 berikut ini :

Tabel 22
Lama Memeluk Agama Islam

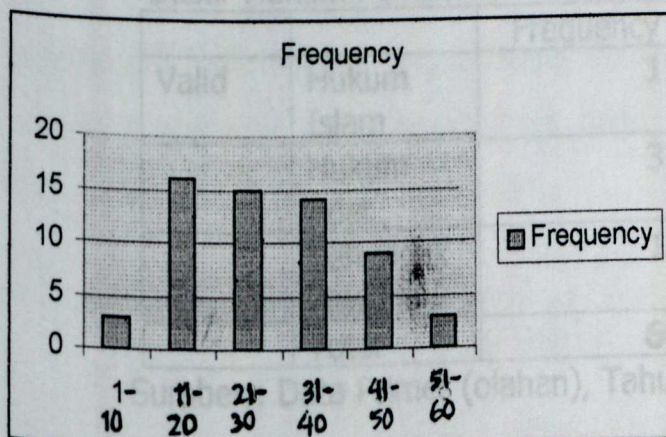
		Frequency	Percent
Valid	1-10 tahun	3	5,0
	11-20 tahun	16	26,7
	21-30 tahun	15	25,0
	31-40 tahun	14	23,3
	41-50 tahun	9	15,0
	51-60 tahun	3	5,0
	Total	60	100,0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang faktor lama memeluk agama Islam mempengaruhi persepsi responden terhadap ahli waris terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 14.

Faktor Lama Memeluk Agama Islam Mempengaruhi Persepsi Responden terhadap Ahli Waris



Melalui tabel 22 dan gambar 14 di atas, diperoleh dari responden bahwa Agama Islam sudah berada lama di Tanah Karo dimana kebanyakan responden menjawab bahwa mereka sudah memeluk agama Islam sekitar 11-40 tahun.

F. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Karo tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris

Kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris terfokus pada lima hal, yakni (1) dasar hukum pemberian warisan kepada anak perempuan, (2) melaksanakan pembagian warisan dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, (3) melaksanakan pembagian warisan dimana janda mendapat bagian warisan, dan (4) landasan responden dan keluarga dalam pelaksanaan pembagian warisan, serta (5) keluarga mematuhi pelaksanaan pembagian warisan.

1. Dasar Hukum Pemberian Warisan Kepada Anak Perempuan

Dalam memberikan warisan kepada anak perempuan di masyarakat muslim Karo memerlukan berbagai dasar hukum yang berlaku, yang terdiri dari hukum Islam, hukum Adat, dan kehendak pewaris. Ketiga keberadaan dasar hukum ini terimplementasi lewat tabel 23 berikut ini :

Tabel 23.

Dasar Hukum Pemberian Warisan Kepada Anak Perempuan

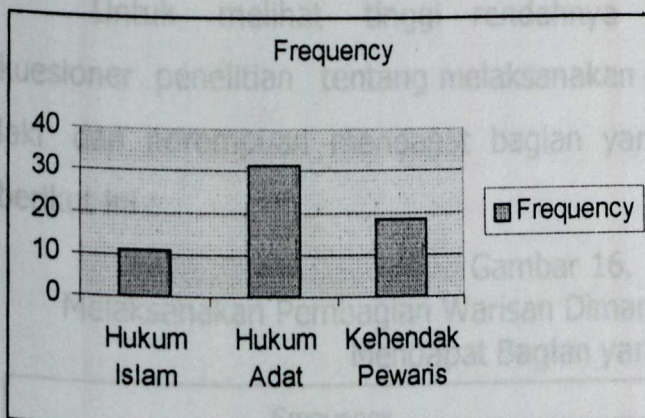
		Frequency	Percent
Valid	Hukum Islam	11	18.3
	Hukum Adat	31	51.7
	Kehendak Pewaris	18	30.0
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang dasar hukum pemberian warisan kepada anak perempuan terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 15.

Dasar Hukum Pemberian Warisan Kepada Anak Perempuan



Dari tabel 23 dan gambar 15 di atas, maka diperoleh bahwa di masyarakat Karo, Hukum Adat lebih berperan dalam pemberian warisan kepada anak perempuan dengan jawaban responden sekitar 51,7%, disusul dengan pembagian warisan kepada anak perempuan menggunakan kehendak pewaris sebesar 30% dan dengan menggunakan hukum Islam sebesar 18,3%.

2. Melaksanakan Pembagian Warisan Dimana laki-laki dan Perempuan

Mendapat Bagian yang Sama

Dalam hal melaksanakan pembagian warisan dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama memiliki dua alternatif, yakni pernah terlaksana dan pernah juga tidak terlaksana. Kedua alternatif ini terangkum dalam tabel 24 berikut ini :

Tabel 24.

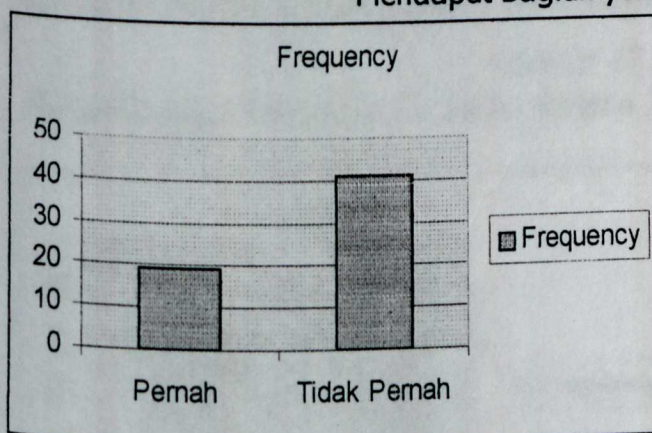
Melaksanakan Pembagian Warisan Dimana Laki-Laki dan Perempuan Mendapat Bagian yang Sama

		Frequency	Percent
Valid	Pernah	19	31.7
	Tidak Pernah	41	68.3
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang melaksanakan pembagian warisan dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 16.
Melaksanakan Pembagian Warisan Dimana Laki-Laki dan Perempuan Mendapat Bagian yang Sama



Dari tabel 24 dan gambar 16 di atas, terlihat bahwa dalam masyarakat Karo kebanyakan perempuan tidak pernah melaksanakan/mendapat pembagian warisan yaitu sebesar 68,3% sedangkan yang pernah mendapat/melaksanakan pembagian warisan terhadap anak perempuan sebesar 31,7%.

3. Melaksanakan Pembagian Warisan dimana Janda mendapat bagian Warisan

Dalam hal melaksanakan pembagian warisan dimana janda mendapat bagian memiliki dua alternatif, yakni pernah terlaksana dan tidak pernah terlaksana. Kedua alternatif ini terangkum dalam tabel 25 berikut ini :

Tabel. 25.

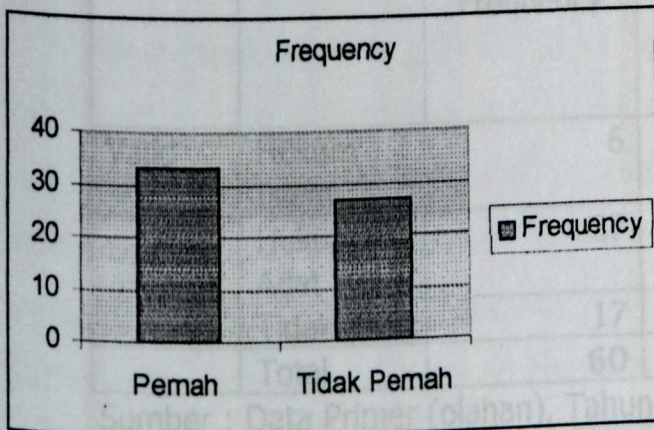
Valid	Pernah	33	55.0
	Tidak Pernah	27	45.0
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang melaksanakan pembagian warisan dimana janda mendapat bagian warisan terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 17.

Melaksanakan Pembagian Warisan dimana Janda mendapat bagian Warisan



Dari tabel 25 dan gambar 17 diatas, diperoleh bahwa responden kebanyakan dengan status sipil janda pernah mendapat warisan yang sama yaitu sebesar 55% dan sedangkan status sipil janda yang tidak pernah mendapat warisan sama adalah sebesar 45%.

4. Landasan Responden dan Keluarga dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, ketentuan yang selama ini dijadikan landasan oleh responden dan keluarga terdiri dari hukum Islam, hukum Adat, dan bisa jadi tidak hukum Islam dan tidak pula dengan hukum Adat. Keberadaan landasan responden dan keluarga dalam pelaksanaan pembagian warisan ini terumus dalam tabel 26 berikut ini :

Tabel 26.

Landasan Responden dan Keluarga dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan

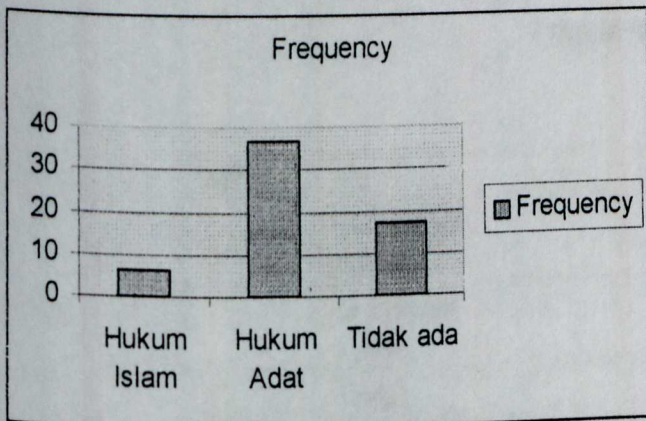
		Frequency	Percent
Valid	Hukum Islam	6	10.0
	Hukum Adat	37	61.7
	Tidak ada	17	28.3
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang landasan responden dan keluarga dalam pelaksanaan pembagian warisan terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 18.

Landasan Responden dan Keluarga dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan



Dari tabel 26 dan gambar 18 di atas, diperoleh bahwa masyarakat Karo menggunakan pelaksanaan warisan dengan menggunakan landasan Hukum Adat yaitu sebesar 61,7% sedangkan tidak menggunakan hukum Adat maupun hukum Islam sebesar 28,3% kemudian selebihnya menggunakan hukum Islam sebesar 10%.

5. Keluarga mematuhi pelaksanaan pembagian warisan

Dalam melihat keberadaan pembagian warisan apakah keluarga responden dapat memakluminya atau dalam pengertian dapat mematuhi keberadaan hukum yang berlaku, apakah hukum Islam maupun hukum Adat, maka bisa saja keluarga responden dalam hal ini memilih jawaban memang pernah mematuhinya, atau sebagian besar mematuhinya dan sebagian kecil mematuhinya, atau bahkan tidak pernah mematuhinya. Tergambar dalam tabel 27 berikut ini :

Tabel 27.
Keluarga Mematuhi Pelaksanaan Pembagian Warisan

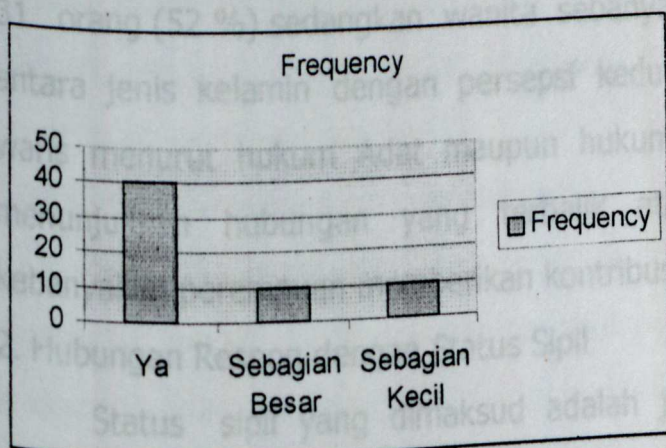
		Frequency	Percent
Valid	Ya	40	66,8
	Sebagian Besar	10	16,6
	Sebagian Kecil	10	16,6
	Total	60	100.0

Sumber : Data Primer (olahan), Tahun 2004

Untuk melihat tinggi rendahnya jawaban responden terhadap kuesioner penelitian tentang Keluarga mematuhi pelaksanaan pembagian warisan terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 19.

Keluarga Mematuhi Pelaksanaan Pembagian Warisan



Dari tabel 27 dan gambar 19 di atas, diperoleh bahwa kebanyakan di masyarakat Karo mematuhi pelaksanaan pembagian warisan yaitu sebanyak 40 % yang sebagian kecil yang tidak mematuhi.

G. Hubungan Karakteristik Responden terhadap Persepsi Masyarakat Muslim Karo

Untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan metode korelasi sebagaimana yang terlihat dalam lampiran Matriks Korelasi Antara Karakteristik Responden terhadap Persepsi Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat maupun Hukum Islam. Dikatakan berkorelasi sebagaimana yang dapat dilihat pada Matriks Korelasi Antara Karakteristik Responden terhadap Persepsi Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat maupun Hukum Islam adalah apabila berada pada interval $-1 > 0 > 1$, sebagaimana keterangannya berikut ini :

1. Hubungan Respon dengan Jenis Kelamin

Ada dua jenis kelamin responden, yakni jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dan yang paling banyak adalah laki-laki sebanyak 31 orang (52 %) sedangkan wanita sebanyak 29 orang (48 %). Hubungan antara jenis kelamin dengan persepsi kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam sebesar -0,291 berarti menunjukkan hubungan yang terbalik atau dengan kata lain bahwa kebanyakan perempuan memberikan kontribusi pada penelitian ini.

2. Hubungan Respon dengan Status Sipil

Status sipil yang dimaksud adalah jumlah responden yang sudah menikah dan yang sudah duda atau janda. Dari 60 responden, maka kebanyakan jumlah responden status sipil adalah yang sudah menikah yaitu sebanyak 53 orang (88,3 %) dan sisanya sebanyak 7 orang (11,7 %) adalah mereka yang sudah duda atau janda. Dengan demikian, maka variabel Status sipil mempunyai hubungan sangat rendah yaitu sebesar 0,007.

3. Hubungan Respon dengan U m u r

Responden disebut berumur tua bila dia berumur 82 tahun atau di atas 81 tahun sebanyak 1 orang (1,7 %). Berumur sedang jika umur responden berkisar 41 – 50 tahun. Responden berumur ini sebanyak 18 orang (30,0 %) dan usia responden yang termuda pada usia 20 tahun sebanyak 1 orang (1,7 %).

Umur responden yang paling banyak adalah pada usia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (33,3%), selanjutnya usia 41 - 50 tahun sebanyak 18 orang (30,0 %), usia 21 - 30 tahun sebanyak 10 orang (16,6 %). Usia 51 - 60 tahun sebanyak 7 orang (11,7 %) dan usia 61 – 70 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %). Sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia yang terendah yakni 20 tahun dan usia yang tertinggi yakni 81 tahun masing-masing sebanyak 1 orang (1,7 %). Hubungan antara variabel umur dengan persepsi kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam mempunyai hubungan yang positif yaitu sebesar 0,127. Hal ini berarti semakin tinggi umur seseorang akan cenderung mengharapkan perempuan mendapat warisan.

4. Hubungan Respon dengan Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden dikelompokkan menjadi : bertani/berternak, pedagang dan pegawai negeri/swasta. 46 orang (76,7 %) responden memiliki pekerjaan bertani kemudian pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 8 responden (13,3 %), selanjutnya PNS sebanyak 4 responden (6,7 %) dan lain-lain (pensiunan PNS) sebanyak 2 responden (3,3 %). Dengan demikian, maka hubungan antara Variabel pekerjaan dengan persepsi Kedudukan wanita sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam mempunyai hubungan yang rendah sehingga bisa dikatakan tidak mempunyai pengaruh variabel yang satu dengan yang lainnya.

5. Hubungan Respon dengan Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga merupakan jumlah tanggungan keluarga. Bahwa jumlah tanggungan banyak bila responden mempunyai tanggungan > 3 orang anggota keluarga di rumah, yakni pada jumlah 3 – 4 orang sebanyak 14 responden (23,33 %), disusul jumlah tanggungan antara 5 – 6 orang sebanyak 13 responden (21,67 %) dan paling sedikit responden yakni 1 orang (1,67 %) mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 orang. Dengan demikian, pengaruh variabel jumlah anggota keluarga terhadap persepsi kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam mempunyai hubungan negatif yaitu sebesar -0,299 yang berarti semakin sedikit anggota keluarga akan cenderung mengharapkan perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

6. Hubungan Respon dengan Pendidikan

Dikatakan responden berpendidikan tinggi bila dia tamat SLTA/ sederajat, berpendidikan sedang jika dia tamat SLTP/ sederajat dan berpendidikan rendah jika pendidikannya di bawah SLTP/ sederajat. Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah lulus SLTA sebanyak 21 orang (35 %) dan paling sedikit adalah responden yang tidak pernah sekolah sebanyak 1 orang (1,67 %). Dengan demikian, maka variabel tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang rendah yaitu sebesar (-0,047) terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

7. Hubungan Respon dengan Lama Memeluk Agama Islam

Masa responden yang paling lama memeluk agama Islam adalah pada masa 11 – 20 tahun, yaitu sebanyak 16 orang (26,7 %), selanjutnya pada masa 21 - 30 tahun sebanyak 15 orang (25,0 %), pada masa 31 - 40 tahun sebanyak 14 orang (23,3 %). Usia 51 - 60 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %) Sedangkan pada masa yang baru memeluk agama Islam yang sekaligus

responden yang paling sedikit adalah pada masa 1 – 10 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %). Dengan demikian, pengaruh variabel jumlah lama memeluk Islam terhadap persepsi kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam mempunyai hubungan positif yaitu sebesar 0,172 yang berarti semakin lama seseorang memeluk agama Islam akan lebih memberikan kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

H. Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Persepsi Masyarakat Muslim Karo

Dalam pembahasan pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim Karo adalah karakteristik sebagai variabel bebas dan respon sebagai variabel tak bebas/terikat. Karakteristik responden ini terdiri dari : X1 (Jenis Kelamin); X2 (Status Sipil); X3 (Umur); X4 (Pekerjaan); X5 (Jumlah Anggota Keluarga); X6 (Tingkat Pendidikan); dan X7 (Lama Memeluk Agama Islam).

Untuk memperoleh pernyataan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Persepsi masyarakat muslim Karo adalah sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan Kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo adalah sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).

Persepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik responden yang diperlukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan hukum Islam.

Dengan mengasumsikan bahwa data pengamatan mengikuti distribusi normal yang berbentuk linier maka berdasarkan perhitungan koefisien-

koefisien regresi diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = 4,776 - 0,665X_1 - 0,306X_2 + 0,114 X_3 - 0,08 X_4 - 0,286 X_5 - 0,122 X_6 + 0,219 X_7$$

Keterangan :

1. Persamaan Regresi berganda $Y = 4,776 - 0,665X_1 - 0,306X_2 + 0,114 X_3 - 0,08 X_4 - 0,286 X_5 - 0,122 X_6 + 0,219 X_7$ yang berarti bahwa Karakteristik responden mempunyai pengaruh terhadap persepsi masyarakat muslim karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kab Karo karena koefisien regresi yang ada pada model regresi tersebut tidak sama dengan 0. Sehingga Perubahan yang terjadi adalah perubahan yang terjadi pada indikator karakteristik seorang masyarakat muslim di Kabupaten Karo menyatakan perubahan pada variabel kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.(Y).
2. Koefisien regresi variabel jenis kelamin pada model ini diperoleh sebesar - 0,665 berarti adanya pengaruh terbalik antara laki-laki dengan perempuan terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Dimana pada penelitian ini objek yang diteliti adalah perempuan, mungkin perempuan lebih tertarik terhadap kedudukan mereka sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.
3. Koefisien Status sipil (X_2) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris yaitu sebesar -0,306. Berarti pada variabel ini dapat dilihat bahwa pengaruh yang terbalik yaitu kemungkinan janda/duda lebih cenderung mengharapkan warisan.
4. Variabel umur mempunyai pengaruh positif yang kecil yaitu sebesar 0,114 dimana kemungkinan semakin tua seseorang di wilayah Kabupaten Karo cenderung akan mengharapkan seseorang perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
5. Variabel pekerjaan pada penelitian ini tidak terlalu berpengaruh terhadap

- kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam. Dimana koefisien regresi variabel ini sebesar $-0,008$, nilai koefisien ini tidak memberikan kontribusi terhadap variabel terikat karena nilainya mendekati 0 (nol) sehingga tidak memberikan pengaruh pada indikator pada kedudukan perempuan sebagai ahli waris.
6. Jumlah anggota keluarga seorang keluarga berbanding terbalik terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Hal ini terlihat dari koefisien regresi $-0,286$. Hal ini berarti adanya pengaruh terbalik Jumlah Anggota Keluarga dengan Kedudukan perempuan sebagai ahli waris, dimana keluarga yang berjumlah anggotanya lebih sedikit cenderung mengharapkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam.
 7. Variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang terbalik dimana koefisien regresi sebesar $-0,122$ dimana pendidikan yang lebih rendah cenderung mendukung kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam.
 8. Lama memeluk agama Islam sebagai kepercayaan mempunyai nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar $0,219$. Hal ini berarti masyarakat muslim Karo yang berada di Kabupaten Karo dan sudah lama memeluk agama Islam sangat mendukung bahwa kedudukan perempuan sebagai ahli waris baik menurut Hukum Adat maupun Hukum Islam.
 9. Korelasi berganda dinotasikan r yang berguna untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bantuan komputer diperoleh r sebesar $0,548$ yang berarti mempunyai hubungan positif yang cukup antara karakteristik responden masyarakat muslim Karo di Kabupaten Karo (Jenis Kelamin, Status Sipil, Umur, Pekerjaan, Jumlah Anggota Keluarga, Tingkat Pendidikan dan Lama

memeluk agama Islam) terhadap persepsi Kedudukan Perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Karo. Dinyatakan berkorelasi apabila berada diantara $-1 < r < 1$.

10. Koefisien korelasi determinasi dinotasikan r^2 . Berdasarkan perhitungan komputer diperoleh dengan menggunakan perumusan koefisien korelasi diperoleh r^2 sebesar 0,30 yang artinya variabel jenis kelamin (x_1), Status sipil (x_2) Umur (x_3), Variabel Pekerjaan (x_4), Variabel Jumlah Anggota Keluarga (x_5), Variabel Tingkat Pendidikan (x_6), Variabel lama memeluk Agama Islam (x_7) dapat menerangkan pengaruhnya terhadap persepsi kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun hukum Islam di Kabupaten Karo (Y) sebesar 30 % dan sisanya 70 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Faktor-faktor lain mungkin diasumsikan bahwa mempunyai pengaruh yang sedikit. Dapat dikatakan bahwa bukan karakteristik warga saja yang mempengaruhi kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat maupun Hukum Islam di Kabupaten Karo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut hukum Adat ada. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 39 orang responden atau 65 % menjawab ada dari 60 responden dan 30 % menyatakan perempuan tidak ahli waris serta 5 % menyatakan ragu-ragu. Sedangkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam pada umumnya responden menyatakan ada yaitu sebanyak 49 orang atau 81,7 %, menyatakan tidak ada sebanyak 2 orang atau 3,3 % dan menyatakan ragu-ragu sebanyak 9 orang atau 15 %.
2. Persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo dapat dilihat dari dua sikap responden yaitu jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan dan jika harta warisan diberikan kepada janda. Sikap responden jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan kebanyakan setuju sebanyak 48 orang atau sebesar 80,0 %, sangat setuju sebanyak 11 orang atau 18,3 % dan tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,7 % dan sangat tidak setuju tidak

ada. Sedangkan sikap responden jika harta warisan diberikan kepada janda, kebanyakan setuju, yaitu sebanyak 49 orang atau 81,7 %, sangat setuju sebanyak 7 orang atau 11,7 % dan tidak setuju sebanyak 4 orang atau 6,7 %.

3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat dari jenis kelamin, status sipil, umur, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan lama memeluk agama Islam. Jenis kelamin, responden laki-laki dan perempuan hampir sama, laki-laki sebanyak 31 orang atau 51,7 % dan perempuan sebanyak 29 orang atau 48,3 %. Status sipil, kebanyakan responden sudah menikah yaitu sebanyak 53 orang atau 88,3 % dan selebihnya sebanyak 7 orang atau 11,7 % adalah mereka yang sudah duda atau janda. Umur, paling banyak usia responden pada usia 31 – 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (33,3 %), disusul usia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang (30,0 %), usia 21 – 30 tahun sebanyak 10 orang (16,7 %). Usia 51 – 60 tahun sebanyak 7 orang (11,7 %) dan usia 61 – 70 tahun sebanyak 3 orang (5,0 %). Dan usia yang paling sedikit yang paling terendah yaitu 20 tahun dan usia yang tertinggi yaitu 81 tahun masing-masing sebanyak 1 orang (1,7 %). Pekerjaan responden yang terbanyak adalah sebagai petani yaitu 46 orang (76,70

%), kemudian sebagai pedagang sebanyak 8 orang (13,30 %), selanjutnya PNS sebanyak 4 orang (6,70 %) dan selain-lain (pensiunan PNS) sebanyak 2 orang (3,30 %). Jumlah anggota keluarga responden paling banyak 3-4 orang sebanyak 14 responden (23,3 %), disusul jumlah 5-6 orang sebanyak 13 responden (21,7 %) dan paling sedikit yakni 1 orang (1,7 %) mempunyai anggota keluarga sebanyak 1 orang. Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah lulus SLTA sebanyak 22 orang (36,7 %), disusul dengan SLTP sebanyak 16 orang (26,7 %), kemudian Pendidikan dasar sebanyak 12 orang (20,0 %), serta perguruan tinggi sebanyak 9 orang (15,0 %) dan tidak sekolah sebanyak 1 orang (1,7 %). Lama memeluk agama Islam, responden yang paling lama memeluk agama Islam adalah 11-20 tahun yaitu sebanyak 16 orang (26,7 %), selanjutnya pada masa 21-30 tahun sebanyak 15 orang (25,0 %), masa 31-40 tahun sebanyak 14 orang (23,3 %). Usia 51-60 tahun sebanyak 7 orang (11,7 %). Dan yang paling sedikit masa memeluk agama Islamnya, yaitu 1-10 tahun yaitu usia 50 tahun masing-masing sebanyak 3 orang (5,0 %).

4. Kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu dasar hukum pemberian harta warisan kepada anak perempuan,

pelaksanaan pembagian harta warisan dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, pelaksanaan pembagian warisan janda mendapat warisan, landasan yang dijadikan responden dan keluarga dalam pembagaian harta warisan serta keluarga mematuhi pembagaian harta warisan tersebut. Dalam dasar hukum yang digunakan untuk pemberian warisan kepada anak perempuan, hukum Islam sebanyak 11 responden (18,3 %), hukum Adat sebanyak 31 orang (51,7 %), dan kehendak pewaris sebanyak 18 orang (30,0%). Sedangkan pelaksanaan pembagian warisan dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, pernah sebanyak 19 orang (31,7 %), tidak pernah sebanyak 41 orang (68,3 %). Melaksanakan pembagian warisan dimana janda mendapat warisan 33 orang (55 %) menyatakan pernah dan 27 orang (45 %) menyatakan tidak pernah. Adapun landasan responden dan keluarga dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, 6 orang (10 %) yang menyatakan hukum Islam, 37 orang (61,7) hukum Adat dan tidak keduanya sebanyak 17 orang (28,3 %). Sedangkan keluarga responden mematuhi pelaksanaan pembagian warisan tersebut, sebanyak 37 orang (61,7 %) menyatakan ya, 17 orang (28,3 %) yang menyatakan sebagian besar dan sebanyak 6 orang (10,0 %) menyatakan sebagian kecil.

5. Hubungan karakteristik responden terhadap persepsi masyarakat muslim

Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten

Karo, tidak sepenuhnya mempunyai hubungan. Hal ini dapat diperoleh :

- (1) jenis kelamin sebesar $r = -0,291$ (menunjukkan hubungan terbalik atau dengan kata lain kebanyakan perempuan memberikan kontribusi pada penelitian ini).
- (2) status sipil sebesar $r = 0,007$ (mempunyai hubungan yang sangat rendah).
- (3) umur sebesar $r = 0,127$ (mempunyai hubungan yang positif).
- (4) pekerjaan mempunyai hubungan yang rendah terhadap persepsi responden terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris sehingga bisa dikatakan tidak mempunyai pengaruh variabel yang satu dengan yang lainnya.
- (5) jumlah anggota keluarga sebesar $r = -0,299$ (berarti mempunyai hubungan negatif, dalam artian semakin sedikit anggota keluarga akan cenderung mengharapkan perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris).
- (6) tingkat pendidikan sebesar $r = -0,047$ (berarti pendidikan mempunyai hubungan yang rendah terhadap kedudukan perempuan sebagai ahli waris).
- (7) lama memeluk agama Islam sebesar $r = 0,189$ (berarti mempunyai hubungan yang positif dalam artian semakin lama seseorang memeluk agama Islam akan lebih memberikan kedudukan perempuan sebagai ahli waris).

6. Karakteristik responden berpengaruh terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
7. Kasus tentang kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Karo sampai saat ini belum ada yang sampai ke Pengadilan Agama Kabanjahe.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Disarankan kepada masyarakat muslim Karo agar lebih memahami agama Islam secara *kāffah*, sebagai agama yang telah dipilih, dijadikan sebagai pedoman hidup dan bukan sekedar agama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk.
2. Disarankan kepada masyarakat Karo agar tidak mempertentangkan hukum Adat dan Hukum Islam walaupun ada perbedaan.
3. Kepada para da'i-da'i Islam dan organisasi keagamaan (Muhammadiyah, al-Washliyah dan sebagainya) yang mempunyai majelis Tabligh dan dakwah Khusus dalam menyampaikan ajaran Islam agar memasukkan materi hukum waris ke dalam materi pengajian rutin yang dilakukan. Dengan demikian sasaran dakwah itu nantinya akan tercapai dan ajaran

Islam itu mempunyai pengaruh bagi pemeluknya (dalam hal ini masyarakat muslim Karo).

4. Untuk peneliti yang akan datang hendaknya melakukan kesinambungan penelitian ini, seperti hubungan hak *Ulayat* dalam hukum Adat jika ditinjau menurut hukum Islam.

- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi Perkembangan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1994.
- Bangun, Tridah. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, Jakarta : Kesaint Blanc, 1986.
- Katalog BPS. *Kecamatan Simpang Empat dalam Angka*, BPS Kecamatan Simpang Empat. 2001.
- Milala, S. Djaja dan Peranginangin, Aswin. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung : Tarsito, 1979.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Khamsah*, (diterjemahkan Masykur AB. Dkk.) Cet. II, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996.
- Mulyadi, Kuneng. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : PT. Setio Acneers, 1996.
- an-Naisabury, Imam Abi Husain Muslim Bin Hujaj bin Muslim al-Qasyiri. *al-Jami'u ash-Shahih Muslim*, Juz V, Semarang : Tisha Putra, t.t.
- Parundungan, A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Cet. IV, Beirut : Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

DAFTAR BACAAN

- Al-Qur'ān al-Karīm*
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. *al-Jami'ū as-Shahih Sunan at-Turmudzi*, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi Perkembangan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1994.
- Bangun, Tridah. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, Jakarta : Kesaint Blanc, 1986.
- Katalog BPS, *Kecamatan Simpang Empat dalam Angka*, BPS Kecamatan Simpang Empat. 2001.
- Milala, S. Djaja dan Peranginangin, Aswin. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung : Tarsito, 1979.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Khamsah*, (diterjemahkan Masykur AB. Dkk.) Cet. II, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996.
- Mulyadi, Kuneng. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : PT. Setio Acnees, 1996.
- an-Naisabury, Imam Abi Husain Muslim Bin Hujaj bin Muslim al-Qasyiri. *al-Jami'ū ash-Shahih Muslim*, Juz V, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Cet. IV, Bairut : Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Alumni, 1993.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- ash-Shabuni, Muchammad Ali. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Alih Bahasa Zaid Husein al-Hamid), Surabaya : Mutiara Ilmu, t.t.
-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sitepu, Bujur. *Mengenal Kebudayaan Karo*, Sigarang-garang Kabanjahe : t.p. 1978
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali, 1981.
- Winkel, W.S., *Psikologi Pengajaran*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996.

Lampiran I : Data Responden

No Urut Res-Ponden	A (Jenis Kelamin)	B (Status Sipil)	C (Umur)	D (Pekerjaan)	E (Jumlah anggota keluarga)	F (Tingkat Pendidikan)	G (lama memeluk Agama Islam)
01	1	1	49=3	1	5	4	49=5
02	2	1	28=1	1	3	5	28=3
03	2	1	33=2	4	5	5	33=4
04	2	1	33=2	1	3	4	33=4
05	2	1	20=1	1	3	3	20=2
06	2	2	82=7	1	1	1	1=1
07	2	1	34=2	1	5	3	5=1
08	2	1	50=3	1	4	3	50=5
09	2	1	40=2	1	7	2	35=4
10	2	1	45=3	1	7	4	45=5
11	2	1	28=1	1	4	4	28=3
12	2	1	26=1	1	4	4	26=3
13	1	1	47=3	6	7	4	47=5
14	2	1	30=1	1	5	3	30=3
15	1	1	52=4	1	3	4	30=3
16	1	1	45=3	1	3	3	45=5
17	1	1	35=2	1	2	4	30=3
18	1	1	50=3	1	3	3	57=6
19	1	1	60=4	1	4	3	30=3
20	1	1	30=1	2	2	4	20=2
21	1	2	50=3	1	7	3	50=5
22	1	1	30=1	2	2	4	20=2
23	1	1	40=2	1	4	3	15=2
24	1	2	35=2	1	5	4	20=2
25	1	1	65=5	6	5	4	18=2
26	1	1	35=2	1	7	3	29=3
27	1	1	38=2	1	6	4	30=3
28	1	1	25=1	1	4	4	25=3
29	1	1	34=2	2	6	4	34=4
30	1	1	43=3	1	3	3	20=2
31	1	1	31=2	2	3	5	31=4
32	1	1	32=2	1	4	4	32=4
33	1	1	35=2	4	5	5	35=4
34	2	1	35=2	1	5	4	12=2
35	1	1	52=4	1	6	2	20=2
36	1	1	47=3	1	4	3	47=5
37	1	1	32=2	1	5	3	32=4
38	1	1	39=2	1	6	5	15=2
39	1	1	65=5	1	9	5	50=5

40	2	2	54=4	1	3	3	38=4
41	1	1	46=3	1	6	2	15=2
42	1	1	34=2	1	3	4	34=4
43	1	1	48=3	1	6	3	21=3
44	1	1	57=4	1	6	3	33=6
45	1	1	30=1	1	4	4	30=3
46	2	1	33=1	1	3	5	33=4
47	2	1	46=3	4	3	2	46=5
48	2	1	34=2	1	5	2	15=2
49	2	2	64=5	1	6	2	55=6
50	2	2	53=4	2	1	4	10=1
51	2	1	30=1	1	5	2	12=2
52	2	1	47=3	1	6	2	25=3
53	2	1	47=3	4	6	5	36=4
54	2	1	46=3	1	5	2	20=2
55	2	1	32=2	2	6	4	32=4
56	2	1	43=3	1	6	2	18=2
57	2	1	29=1	2	3	5	29=3
58	2	1	44=3	1	5	2	22=3
59	2	2	41=3	2	3	4	15=2
60	2	1	57=4	1	6	2	57=6

Keterangan :

(Responden Nomor 1- 30 merupakan masyarakat muslim Karo yang berasal dari desa mayoritas beragama Islam dan Responden Nomor 31- 60 masyarakat muslim Karo berasal dari desa minoritas beragama Islam)

A): Jenis Kelamin: B) : Status Sipil C) : Umur D) : Pekerjaan

1. Laki-laki
2. Perempuan

1. Menikah
2. Duda/Janda

1. 20-30 thn
2. 31-40 thn
3. 41-50 thn
4. 1-60 thn

1. Petani
2. Pedagang
3. Buruh
4. PNS.

5. 61-70 thn
6. 71-80
7. > 81

5. ABRI
6. Lain-lain

E) Jumlah anggota Keluarga: F) Pendidikan

1. 1-2 orang
2. 3-4 orang
3. 5-6 orang
4. 7-8 orang
5. 9 orang >

1. Tidak Sekolah
2. Pendidikan Dasar
3. SLTP
4. SLTA
5. Perguruan Tinggi

G) Lama Memeluk Agama Islam:

1. 1-10 tahun
2. 11-20 tahun
3. 21-30 tahun
4. 31-40 tahun
5. 41-50 tahun
6. 50 >

Lampiran 2 : Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Nomor Urut Responden	A	B	Nomor Urut Responden	A	B
01	1	1	31	1	2
02	1	1	32	1	2
03	2	1	33	3	1
04	1	1	34	1	1
05	1	1	35	1	3
06	1	3	36	3	3
07	1	1	37	1	1
08	1	1	38	1	1
09	2	1	39	1	1
10	1	1	40	1	1
11	1	1	41	1	1
12	2	3	42	2	1
13	1	1	43	1	1
14	1	1	44	1	1
15	1	3	45	2	1
16	3	3	46	2	1
17	2	3	47	1	1
18	2	3	48	2	1
19	2	3	49	2	1
20	2	1	50	1	1
21	2	1	51	1	1
22	2	1	52	2	1
23	2	1	53	2	1
24	2	1	54	1	1
25	1	1	55	1	1
26	1	1	56	1	1
27	1	1	57	1	1
28	1	1	58	1	1
29	1	1	59	1	1
30	1	1	60	1	1

Keterangan : (Responden Nomor 1 – 30 merupakan Masyarakat Muslim Karo Yang Berasal dari Desa Mayoritas Beragama Islam dan Responden Nomor 31 – 60 Merupakan Masyarakat Muslim Karo Yang Berasal dari Desa Yang Minoritas Beragama Islam)

A. Kedudukan Perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut hukum Adat:

1. Ada 2. Tidak ada 3. Ragu-ragu

B. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam:

1. Ada 2. Tidak Ada 3. Ragu-ragu

Nomor Urut Responden	1	2	3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
01																																	
02																																	
03																																	
04																																	
05																																	
06																																	
07																																	
08																																	
09																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	

Keterangan : (Responden Nomor 1 – 30 merupakan Masyarakat Muslim Karo Yang Berasal dari Desa Mayoritas Beragama Islam dan Responden Nomor 31 – 60 Merupakan Masyarakat Muslim Karo Yang Berasal dari Desa Yang Minoritas Beragama Islam)

A. Sikap Responden Jika Harta Warisan Diberikan Kepada Anak Perempuan:

1. sangat setuju 2. setuju 3. tidak setuju 4. sangat tidak setuju

B. Sikap Responden Jika Harta Warisan Diberikan Kepada Laki-laki:

1. sangat setuju 2. setuju 3. tidak setuju 4. sangat tidak setuju

Lampiran 3 : Persepsi Masyarakat Muslim Karo Tentang kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris di Kabupaten Karo

Nomor Urut Responden	A	B	Nomor Urut Responden	A	B
01	1	2	31	2	2
02	2	3	32	1	2
03	2	2	33	1	1
04	2	2	34	1	2
05	3	3	35	2	2
06	1	1	36	2	2
07	2	2	37	2	2
08	2	2	38	2	2
09	2	2	39	2	2
10	2	2	40	2	1
11	1	2	41	2	2
12	2	1	42	1	1
13	2	2	43	2	2
14	1	2	44	2	2
15	2	2	45	2	2
16	2	2	46	2	2
17	2	2	47	2	2
18	2	2	48	2	2
19	2	2	49	2	2
20	2	2	50	2	2
21	2	2	51	2	2
22	2	2	52	2	2
23	2	2	53	2	2
24	2	2	54	2	2
25	2	2	55	2	2
26	2	2	56	2	2
27	1	3	57	1	1
28	1	2	58	2	2
29	2	3	59	2	2
30	2	1	60	2	2

Keterangan : (Responden Nomor 1 – 30 merupakan Masyarakat Muslim Karo Yang Berasal dari Desa Mayoritas Beragama Islam dan Responden Nomor 31 – 60 Merupakan Masyarakat Muslim Karo Yang Berasal dari Desa Yang Minoritas Beragama Islam)

A. Sikap Responden Jika Harta Warisan Diberikan Kepada Anak Perempuan:

1. sangat setuju 2. setuju 3. tidak setuju 4. sangat tidak setuju

B. Sikap Responden Jika Harta Warisan Diberikan Kepada Janda:

2. sangat setuju 2. setuju 3. tidak setuju 4. sangat tidak setuju

Lampiran 4 : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Karo Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Kabupaten Karo

No Urut Responden	A	B	C	D	E	No Urut Responden	A	B	C	D	E
01	2	2	4	4	1	31	3	2	1	1	1
02	3	2	1	3	3	32	1	1	1	3	2
03	3	2	2	2	3	33	1	2	2	3	3
04	2	2	1	2	2	34	2	1	1	3	3
05	2	2	2	2	1	35	3	2	1	2	2
06	2	2	1	3	1	36	2	2	1	2	1
07	2	2	2	2	1	37	1	1	1	2	1
08	1	2	1	1	1	38	1	2	2	2	1
09	3	2	1	3	1	39	3	1	1	2	2
10	3	2	2	2	1	40	2	2	1	2	2
11	2	1	1	2	1	41	2	1	1	2	3
12	1	1	2	2	3	42	3	2	1	2	3
13	1	2	1	1	1	43	2	2	2	3	1
14	2	1	1	3	2	44	2	2	2	1	1
15	2	2	2	2	1	45	3	2	2	2	1
16	2	2	2	2	1	46	3	1	1	2	3
17	2	2	2	2	1	47	1	1	1	2	1
18	2	2	2	2	1	48	2	1	1	2	1
19	2	2	2	3	1	49	2	2	1	2	3
20	2	2	2	2	1	50	2	2	1	2	3
21	2	2	2	2	1	51	1	1	1	1	1
22	2	2	2	2	1	52	3	1	1	2	1
23	2	2	2	2	1	53	3	2	2	3	1
24	2	2	2	1	1	54	2	2	2	2	1
25	2	2	1	2	1	55	3	1	1	3	1
26	3	2	1	2	1	56	2	1	2	2	1
27	2	2	2	3	1	57	3	2	1	3	2
28	1	2	2	2	1	58	2	1	1	2	2
29	1	2	2	3	1	59	3	1	1	3	1
30	3	1	1	3	1	60	3	1	1	2	2

Keterangan : (Responden Nomor 1 – 30 merupakan masyarakat muslim Karo yang berasal dari desa mayoritas beragama Islam dan Responden Nomor 31 – 60 merupakan masyarakat muslim Karo yang berasal dari desa yang minoritas beragama Islam)

A. Pemberian warisan kepada anak perempuan berdasarkan hukum :

1. Hukum Islam 2. Hukum Adat 3. Kehendak Pewaris

B. Pernahkah Responden atau keluarga Responden melaksanakan pembagian warisan, dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama:

1. Pernah 2. Tidak Pernah

C. Pernahkah Responden atau keluarga Responden melaksanakan pembagian warisan dimana janda mendapat bagian warisan :

1. Pernah 2. Tidak Pernah

D. Dalam pelaksanaan pembagian warisan, ketentuan yang selama ini dijadikan landasan oleh Responden dan Keluarga:

1. Hukum Islam 2. Hukum Adat 3. Tidak Keduanya

E. Keluarga Responden Mematuhinya:

- Ya 2. Sebagian Besar 3. Sebagian Kecil 4. Tidak

III. Identifikasi Responden

01	Nama		
		Desa	
02	Jenis Kelamin	1. Laki-laki	2. Perempuan
03	Status Sipil	1. Menikah	2. Duda/Janda
04	Umur	tahun	
05	Pekerjaan	1. Petani 2. Pedagang 3. Buruh	4. Pegawai Negeri 5. ABRI 6. Lain-lain
06	Jumlah anggota keluarga	orang	
07	Tingkat Pendidikan	1. Tidak Sekolah	

Lampiran : 5

ANGKET PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS

I. Pengantar

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami mendo'akan semoga Bapak/Ibu/Saudara dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah SWT. Dalam rangka mendapatkan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara memberikan data yang sebenarnya dengan menjawab setiap pertanyaan dalam angket ini secara jujur. Jawaban yang diberikan sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak berpengaruh apapun terhadap Bapak/Ibu/Saudara. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

II. Petunjuk

1. Sebelum mengisi angket ini, bacalah petunjuk pengisian dengan teliti.
2. Bacalah terlebih dahulu setiap butir pertanyaan.
3. Setelah pengisian angket ini selesai, harap segera dikembalikan.

III. Identifikasi Responden

01	Nama	_____
	Desa	_____
02	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan
03	Status Sipil	1. Menikah 2. Duda/janda
04	Umur	_____ tahun
05	Pekerjaan	1. Petani 4. Pegawai Negeri 2. Pedagang 5. ABRI 3. Buruh 6. Lain-lain
06	Jumlah anggota keluarga	_____ orang
07	Tingkat Pendidikan	1. Tidak Sekolah

	1. sangat setuju. 2. tidak setuju	2. Pendidikan Dasar 3. SMTP 4. SMTA 5. Perguruan Tinggi
08	Lama memeluk agama Islam	_____ tahun

IV. Pilihlah jawaban yang paling tepat menurut yang pernah Bapak/ Ibu Saudara alami.

1. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut hukum adat:

1. ada 2. tidak ada 3. ragu-ragu.

Kenapa.....?

2. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam:

1. ada 2. tidak ada 3. ragu-ragu

3. Harta warisan yang diperoleh berupa :

1. rumah 2. sawah/ladang 3. lain-lain (uang, perhiasan, atau barang bergerak lainnya)

4. Bagian warisan yang diperoleh :

1. seluruhnya 2. 2 bagian 3. 1 bagian 4. $\frac{1}{4}$ bagian
5. $\frac{1}{8}$ bagian 6. lain-lain

5. Proses pembagian warisan dilakukan ketika pewaris :

1. masih hidup 2. sudah meninggal

6. Sistem hukum warisan yang diketahui berlaku dalam masyarakat :

1. hukum Islam 2. hukum adat

3. hukum barat (BW)

4. tidak tahu

7. Pada umumnya, bagian waris yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat :

1. laki-laki : perempuan = 2 : 1 bagian

2. laki-laki : perempuan

= 1 : 1 bagian

3. tergantung pemberian 4. tidak tahu

8. Sikap Bapak/Ibu/Saudara jika harta warisan diberikan juga kepada anak perempuan :

1. sangat setuju. 2. setuju 3. tidak setuju 4. sangat tidak setuju
9. Sikap Bapak/Ibu/Saudara jika harta warisan juga diberikan kepada janda :
1. sangat setuju. 2. setuju 3. tidak setuju 4. sangat tidak setuju
10. Pemberian warisan kepada anak perempuan berdasarkan hukum :
1. hukum Islam 2. hukum adat 3. kehendak si pewaris
4. lain-lain
11. Pernahkah Bapak/Ibu/Saudara atau keluarga Bapak/Ibu/Saudara melaksanakan pembagian waris, dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama :
1. pernah 2. tidak pernah
12. Pernahkah Bapak/Ibu/Saudara melaksanakan pembagian waris dimana janda mendapat bagian warisan :
1. pernah 2. tidak pernah
13. Dalam pelaksanaan pembagian waris, ketentuan manakah yang selama ini dijadikan landasan oleh Bapak/Ibu/Saudara dan keluarga Bapak/Ibu/Saudara :
1. hukum Islam 2. hukum adat 3. keduanya 4. tidak keduanya
14. Apakah keluarga Bapak/Ibu/Saudara mematuhi :
1. ya 2. sebagian besar 3. sebagian kecil 4. tidak
15. Pengetahuan tentang hukum waris Islam diperoleh melalui :
1. pengajian 2. pendidikan formal 3. informasi lainnya
16. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di kabupaten Karo :
1. setuju 2. sangat setuju 3. ragu-ragu 4. tidak setuju
5. sangat tidak setuju

Terima kasih, Bujur melala !

Lampiran : 6

**BANYAKNYA SARANA IBADAH MENURUT AGAMA TIAP DESA
TAHUN 2001 DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT**

NO	DESA	MESJID	LANGGAR/ MUSHOLLA	GEREJA	KUIL	WIHARA	JUMLAH
1	Tiga Pancur	1	0	0 *	0	0	1
2	Beganding	1	0	3 +	0	0	4
3	Sirumbia	0	0	1	0	0	1
4	Nang Belawan	1	0	2	0	0	3
5	Linggga	1	0	3 +	0	0	4
6	Lingga Julu	1	0	2	0	0	3
7	Ujung/Nd Siroga	1	1	1	0	0	3
8	Surbakti	1	0	2	0	0	3
9	Jeraya	1	0	1	0	0	2
10	Pintu Besi	1	0	0 *	0	0	1
11	Berastepu	1	1	3 +	0	0	5
12	Gamber	1	0	1	0	0	2
13	Kuta Tengah	1	0	1	0	0	2
14	Torong	1	0	0 *	0	0	1
15	Perteguhén	1	0	2	0	0	3
16	Sada Perarih	1	0	2	0	0	3
17	Gajah	1	0	1	0	0	2
18	Bulan Baru	1	0	1	0	0	2
19	Semangat	1	0	1	0	0	2
20	Kmpng Merdeka	1	0	2	0	0	3
21	Gongsol	1	0	0 *	0	0	1
22	Jaranguda	1	0	1	0	0	2
23	Smngat Gunung	1	0	1	0	0	2
24	Cinta Rayat	1	0	2	0	0	3
25	Deram	1	0	1	0	0	2
26	Sukandebi	1	0	1	0	0	2
27	Kuta Tonggal	0	0	1	0	0	1
28	Bekerah	1	0	0 *	0	0	2
29	Simacem	1	0	1	0	0	3
30	Sukanalu	1	0	2	0	0	2
31	Sigarang-garang	1	0	1	0	0	2
32	Kuta Gugung	0	0	1	0	0	1
33	Kuta Rayat	1	0	1	0	0	2
34	Kebayaken	1	0	1	0	0	2
35	Kuta Mbelin	1	0	1	0	0	2
36	Naman	1	0	1	0	0	2
37	Sukatepu	1	0	1	0	0	2
38	Ndeskati	1	0	0 *	0	0	1
39	Gung Pinto	1	0	1	0	0	2
40	Ujung Teran	1	0				
	Jumlah	36	2	48	0	0	86

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan simpang Empat, Tahun 2004
 * Desa yang ada mesjid tapi tidak ada gereja + Desa yang banyak gereja

Lampiran : 7

JARAK DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KANTOR KEPALA DESA (Km)
DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA/KELURAHAN	JARAK DARI IBU KOTA KEC. KE KANTOR KEPALA DESA (Km)
		7 *
1	Tiga Pancur	7 +
2	Beganding	18
3	Sirumbia	9,5
4	Nang Belawan	5 +
5	Linggga	5
6	Lingga Julu	0
7	Ujung/Nd Siroga	1
8	Surbakti	8
9	Jeraya	9 *
10	Pintu Besi	7 +
11	Berastepu	8
12	Gamber	10
13	Kuta Tengah	4 *
14	Torong	1,2
15	Perteguhén	18
16	Sada Perarih	3
17	Gajah	5
18	Bulan Baru	4,5
19	Semangat	14
20	Kmpng Merdeka	8 *
21	Gongsol	8
22	Jaranguda	18
23	Smngat Gunung	18
24	Cinta Rayat	12
25	Deram	8
26	Sukandebi	12
27	Kuta Tonggal	18 *
28	Bekerah	17
29	Simacem	16
30	Sukanalu	17
31	Sigarang-garang	19
32	Kuta Gugung	18
33	Kuta Rayat	22
34	Kebayaken	16
35	Kuta Mbelin	13
36	Naman	11
37	Sukatepu	13
38	Ndeskati	16 *
39	Gung Pinto	16
40	Ujung Teran	11,0
	Rata-rata	

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Simpang Empat, 2004

an : 8 (MATRIKS)

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KARO TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DI KAB. KARO

MASALAH	TUJUAN	HIPOTESIS	DATA	PENG. DATA	METODE ANALISA	HASIL PENELITIAN
Bagaimana kedudukan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut Hukum Adat dan Hukum Islam ?	Menjelaskan kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut hukum Adat dan Hukum Islam	Terdapat perbedaan kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo menurut Hukum Adat dan Hukum Islam	x ₁ ada x ₂ ragu-ragu x ₃ Tidak ada	Skunder	Deskriptif	Kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Adat dan hukum Islam ada, tidak ada perbedaan
Bagaimana masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di kabupaten Karo ?	Mengetahui persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	Masyarakat muslim Karo memberikan kedudukan perempuan sebagai ahli waris	x ₁ sangat setuju x ₂ setuju x ₃ Ragu-ragu x ₄ Tidak setuju x ₅ sangat tidak setuju	Skunder	Deskriptif	Masyarakat muslim Karo setuju memberikan kedudukan perempuan sebagai ahli waris di kabupaten Karo
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo ?	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris : 1. Pengetahuan tentang hukum adat Karo 2. Pengetahuan tentang hukum Waris Islam	x ₁ jenis kelamin x ₂ Umur x ₃ Pendidikan x ₄ Jumlah anggota keluarga x ₅ Lama memeluk agama Islam x ₆ Pemahaman tentang kewarisan Adat dan Islam	Skunder	Deskriptif	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris adalah jenis kelamin, status sipil, umur, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan lama memeluk agama Islam
Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli Waris di Kabupaten Karo ?	Mengetahui kesadaran hukum masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	Kesadaran masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo sadar, tertarik, penilaian, coba-coba, adopsi	x ₁ sangat setuju x ₂ setuju x ₃ tidak setuju x ₄ sangat tidak setuju	Skunder	Deskriptif	Kesadaran masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris belum sepenuhnya memberikan harta warisan

	Apakah ada hubungan karakteristik responden dengan masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo ?	Mengetahui hubungan karakteristik Responden persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	Ada karakteristik Responden persepsi muslim Karo kedudukan perempuan sebagai ahli waris di kabupaten Karo	hubungan karakteristik Responden dengan masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di kabupaten Karo	Data Karakteristik Responden : (1) jenis kelamin (2) status sipil (3) umur (4) pekerjaan (5) jumlah anggota keluarga (6) tingkat pendidikan (7) agama memeluk agama Islam	Primer	Analisa Korelasi Sederhana	kepada perempuan Karakteristik responden belum berhubungan persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris.
06	Apakah ada pengaruh karakteristik Responden terhadap persepsi muslim Karo kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	Mengetahui pengaruh karakteristik Responden terhadap persepsi muslim Karo kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo.	Ada karakteristik Responden terhadap masyarakat Karo kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	pengaruh karakteristik responden persepsi muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo	Data Karakteristik Responden : (1) jenis kelamin (2) status sipil (3) umur (4) pekerjaan (5) jumlah anggota keluarga (6) tingkat pendidikan (7) laama memeluk agama Islam	Primer	Regresi	Karakteristik responden berpengaruh terhadap persepsi masyarakat muslim Karo tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris di Kabupaten Karo ✓

	Jenis Kelamin	Status Sipil	Umur	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Tingkat Pendidikan	Lama Memeluk Agama Islam	Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris
Jenis Kelamin	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1.000 60	-.038 .771 60	-.044 .741 60	-.080 .541 60	-.214 .100 60	-.083 .530 60	-.291* .024 60
Status Sipil	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1.000 60	.419** .001 60	-.068 .606 60	-.185 .156 60	-.154 .240 60	-.090 .496 60	-.007 .961 60
Umur	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.038 .771 60	1.000 .001 60	.105 .424 60	.125 .340 60	-.364** .004 60	.159 .225 60	.127 .333 60
Pekerjaan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.044 .741 60	-.068 .606 60	1.000 .001 60	.058 .662 60	.313* .015 60	.096 .465 60	-.096 .467 60
Jumlah Anggota Keluarga	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.080 .541 60	.125 .340 60	.058 .662 60	1.000 .001 60	-.093 .482 60	.290* .025 60	-.299* .020 60
Tingkat Pendidikan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.214 .100 60	-.364** .004 60	.313* .015 60	-.093 .482 60	1.000 .001 60	.099 .454 60	-.047 .721 60
Lama Memeluk Agama Islam	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.083 .530 60	.159 .225 60	.096 .465 60	.290* .025 60	.099 .454 60	1.000 .001 60	.172 .189 60
Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.291* .024 60	-.007 .961 60	-.096 .467 60	-.299* .020 60	-.047 .721 60	.172 .189 60	1.000 .001 60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lama Memeluk Agama Islam, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Umur, Jumlah Anggota Keluarga, Status Sipil, Tingkat Pendidikan		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.206	.95

a. Predictors: (Constant), Lama Memeluk Agama Islam, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Umur, Jumlah Anggota Keluarga, Status Sipil, Tingkat Pendidikan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.322	7	2.903	3.184	.007 ^a
	Residual	47.412	52	.912		
	Total	67.733	59			

a. Predictors: (Constant), Lama Memeluk Agama Islam, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Umur, Jumlah Anggota Keluarga, Status Sipil, Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris

Coefficients^a

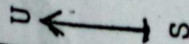
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.776	1.020		4.684	.000
	Jenis Kelamin	-.665	.262	-.313	-2.543	.014
	Status Sipil	-.306	.454	-.092	-.674	.503
	Umur	.114	.128	.134	.892	.376
	Pekerjaan	-8.617E-02	.118	-.093	-.728	.470
	Jumlah Anggota Keluarga	-.286	.082	-.440	-3.499	.001
	Tingkat Pendidikan	-.122	.148	-.117	-.824	.414
	Lama Memeluk Agama Islam	.219	.104	.264	2.109	.040

a. Dependent Variable: Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris

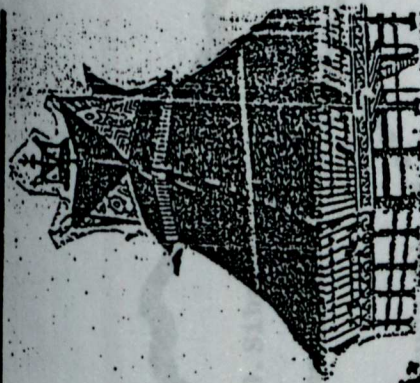
KABUPATEN

K A R O

SKALA : 1 : 250.000



D.I. ACEH



KAB. LANGKAT

KAB. SIMALUNGUN

KAB. TAP. UTARA

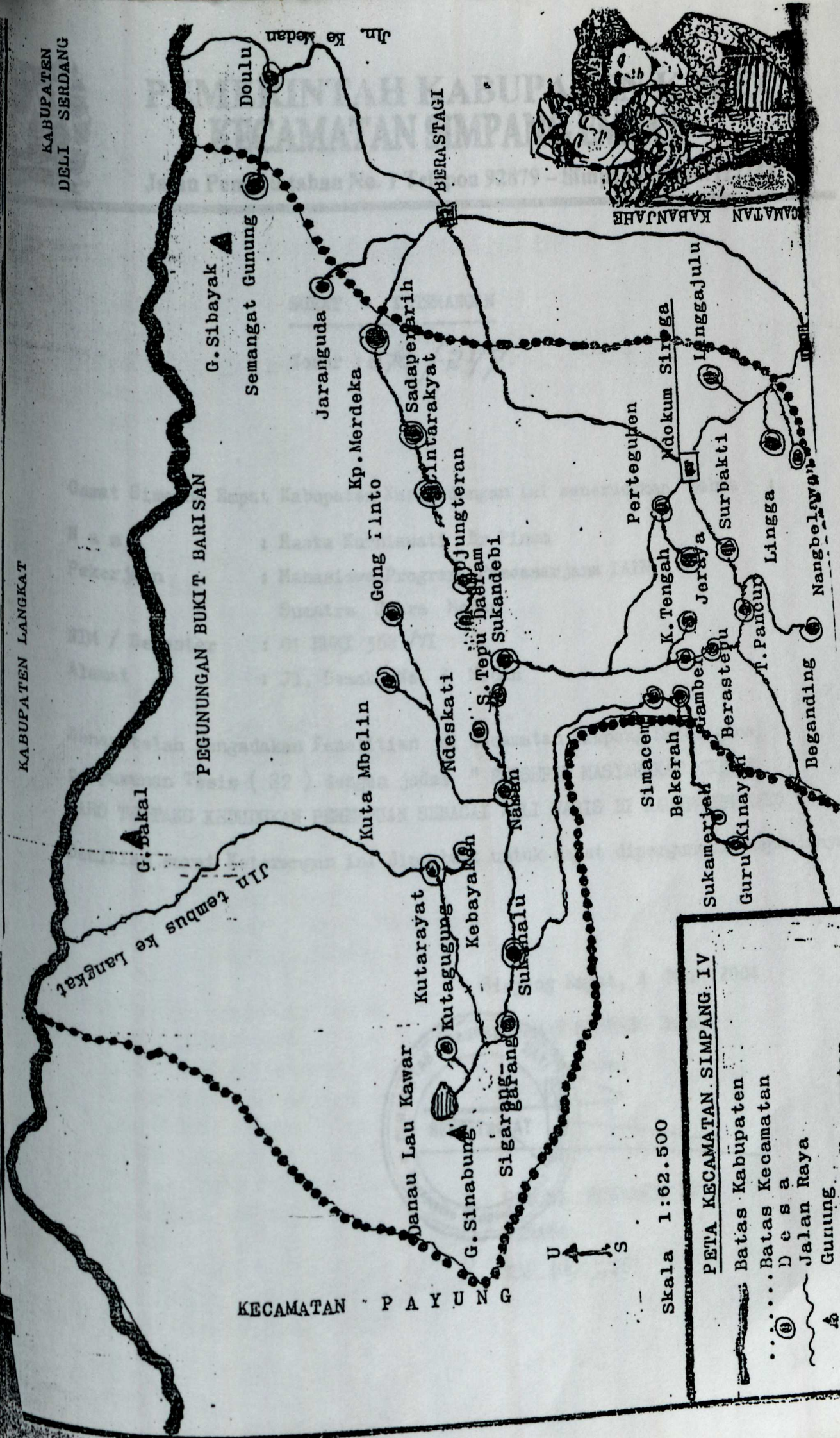
Danau Toba

ETERANGAN:

1. Kecamatan Tiga Dinanga
2. Kecamatan J u h a r
3. Kecamatan Munthe
4. Kecamatan Tigapanah
5. Kecamatan Barusjahe
6. Kecamatan Kabanjahe
7. Kecamatan Simpang IV
8. Kecamatan Payung
9. Kecamatan Kutabuluh
0. Kecamatan Mardinding

- + - Batas Kabupaten
- . - Batas Kecamatan
- ~ Jalan Raya

Sumber : Peta Sumatera Utara Th. 1998



KECAMATAN P A Y U N G

Skala 1:62.500

PETA KECAMATAN SIMPANG IV

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- ① Desa
- Jalan Raya
- ▲ Gunung
- Ibukota Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KARO KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jalan Pemerintahan No. 1 Telepon 92879 – Simpang Empat (22153)

SURAT - KETERANGAN

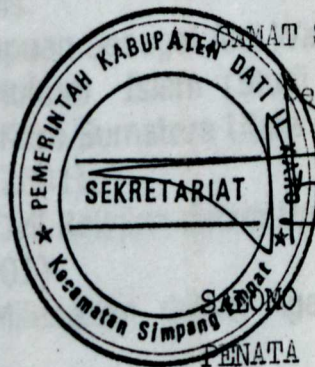
Nomor : 070 / 249.

Camat Simpang Empat Kabupaten Karo dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Rasta Kurniawati Br Pinem
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN
Sumatra Utara Medan
NIM / Semester : 01 HUKI 368 / VI
Alamat : Jl. Demak No. 3 Medan

Benar telah mengadakan Penelitian di Kecamatan Simpang Empat guna
penyusunan Tesis (S2) dengan judul " PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM
KARO TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DI KABUPATEN KARO "
Demikian surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 4 Mei 2004



SAEOMO SURBAKTI SE
PENATA

NIP.400037267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biografi

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Rasta Kurniawati Br. Pinem |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Beganding, 07 Januari 1975 |
| 3. Alamat | : Jl. Demak No. 03 Medan |
| 4. Nama Orang Tua | |
| Ayah | : Jure Pinem |
| Ibu | : Damenta Br. Sitepu |

B. Riwayat Pendidikan

1. 1981-1988, SD Negeri 040472 Beganding
2. 1988-1991, MTs Ponpes Puteri Aisyiyah Medan
3. 1991-1994, MAS Ponpes Muhammadiyah Darul Arqam Kerasaan Simalungun
4. 1994-1999, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh; Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Islam
5. 2001-2004 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan Konsentrasi Hukum Islam

C. Riwayat Pekerjaan

1. 1999 – sekarang, Guru honor di Pondok Pesantren Puteri Aisyiyah Sumatera Utara
2. 2002 – sekarang, Dosen Studi Islam, di Fakultas Hukum Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

D. Karya Ilmiah yang Pernah Ditulis

1. Pendiskreditan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Karo Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Sumatera Utara (Skripsi Tahun 1999)
2. Bani Abbas (Makalah Tahun 2001)
3. Peranan Agama Sebagai Civil Religion dalam Upaya Mewujudkan Civil Society (Makalah Tahun 2001)
4. Revitalisasi dan Gerakan Milenarian dalam Agama (Makalah Tahun 2001)
5. Esthiche Politiek dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Makalah Tahun 2002)
6. Ijtihad (Makalah Tahun 2002)

7. Kedudukan Hakim Agama dalam Peradilan Agama di Indonesia (Suatu Penelusuran Sejarah) (Makalah Tahun 2002)
8. Konflik Dalam Yurisprudensi Islam (Analisa Terhadap Pendapat Noel James Coulson [1928-1986]) (Makalah Tahun 2003)
9. Pemikiran Kontemporer tentang Qawaid Fiqhiyyah dan Implikasinya Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam (Makalah Tahun 2003)
10. Pembentukan Peradilan Era Rasulullah (Makalah tahun 2003)
11. *Ta'arudh al-Ashlain* (Makalah Tahun 2003)

E. Organisasi yang Pernah Diikuti

1. Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 1996-1999
2. Keluarga Besar Muslim Karo (KAMKA) Cabang Banda Aceh Tahun 1995-1999
3. Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Medan Kota Tahun 2001 – 2004
4. Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Tahun 2000-2004
5. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara Bagian Tabligh Tahun 2000 – 2005
6. Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sumatera Utara.